



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIANTO, S.Sos., M.Si.

Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;

7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

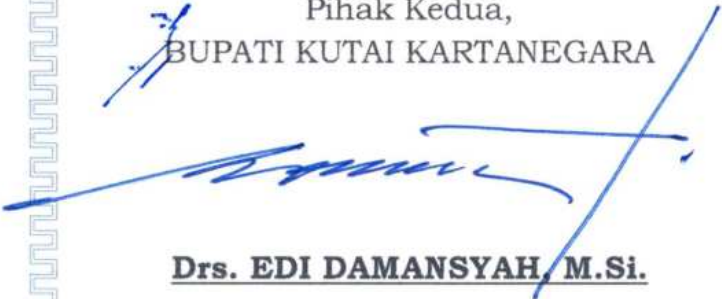
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

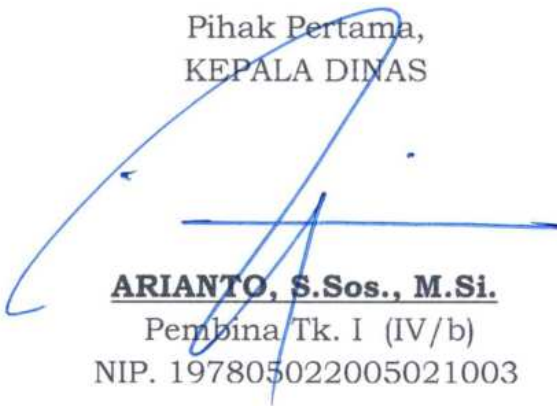
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS


ARIANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197805022005021003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Persen	35,42
2.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
4.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
5.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
6.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
7.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
8.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
9.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
10.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)

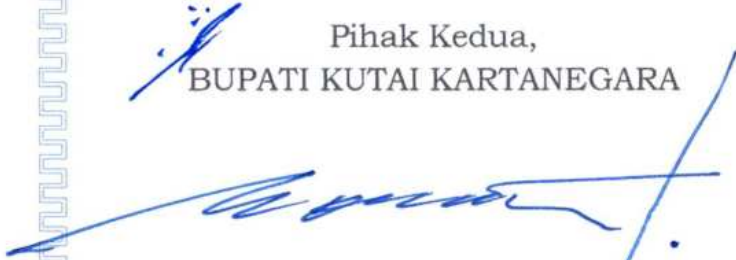
11.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
12.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
13.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
14.	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	14,1

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

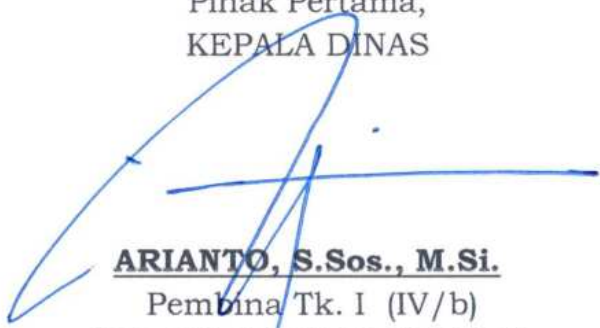
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.26.945.794.210	APBD
2	PROGRAM PENATAAN DESA	Rp.84.204.248.994	APBD
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Rp.500.000.000	APBD
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp.23.926.693.870	APBD
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp.19.096.924.500	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.154.673.661.574	

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS


ARIANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197805022005021003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : MOHAMMAD YUSRAN DARMA, S.Sos, M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai Kartanegara
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : ARIANTO, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai Kartanegara
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;

7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

ARIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780502 200502 1 003

Pihak Pertama
Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

MOH. YUSRAN DARMA, S.Sos, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19711201 199101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Persen	35,42
2	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
4	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
6	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
7	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
9	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
10	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
11	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
12	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
13	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
14	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
15	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	14,1
16	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	5
17	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Daerah	Dokumen /Laporan	4
18	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen /laporan	3

		pada Perangkat Daerah		
19	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN/P3K/Non ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas berdasarkan tugas dan fungsi	orang	151
20	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen /Lapora	212
21	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Barang Milik Daerah yang disediakan	Unit	19
22	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	3
23	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	29
24	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Pebruari setiap tahun	Persen	100

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

ARIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b
NIP. 19780502 200502 1 003

Pihak Pertama
Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

MOH. YUSRAN DARMA, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b
NIP. 19711201 199101 1 001

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	KEGIATAN	Anggaran	Ket
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.000.000.000	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 12.689.562.018	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 105.000.000	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 318.000.000	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 10.242.594.300	APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 257.375.000	APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.809.362.892	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 523.900.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp 26.945.794.210	

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

ARIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780502 200502 1 003

Pihak Pertama
Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

MOH. YUSRAN DARMA, S.Sos, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19711201 199101 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **DEDY SURIANTO, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Kerjasama Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai
Kartanegara.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **ARIANTO, S.Sos, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.
Kutai Kartanegara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

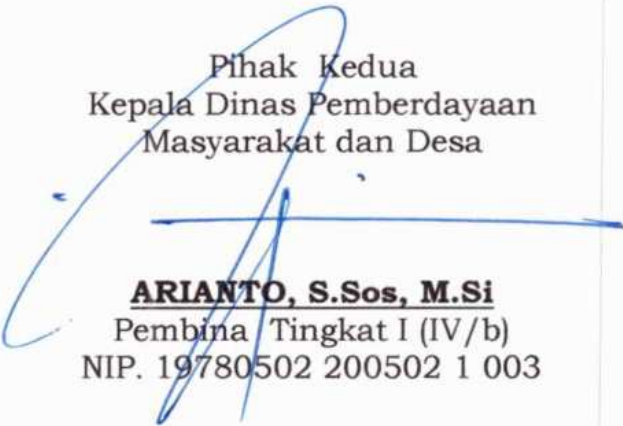
Pihak kedua

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

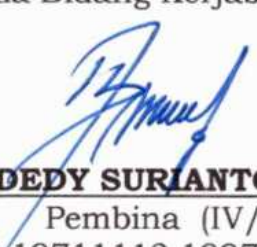
Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa



ARIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780502 200502 1 003

Pihak Pertama
Kepala Bidang Kerjasama Desa



DEDY SURIANTO, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19711112 199703 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIDANG KERJASAMA DESA

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Persen	35,42
2.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
4.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
5.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
6.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
7.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
8.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
9.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
10.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
11.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77

12.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
13.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
14.	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	14,1

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025 BIDANG KERJASAMA DESA

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Rp. 500.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

ARIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780502 200502 1 003

Kepala Bidang Kerjasama Desa

DEDY SURIANTO, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19711112 199703 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **ASMI RIYANDI ELVANDAR, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai Kartanegara.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **ARIANTO, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai Kartanegara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;

7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

ARIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780502 200502 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Pengembangan Ekonomi Desa

ASMI RIYANDI ELVANDAR, S.Sos, M.Si
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840111 2010 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Persen	35,42
2.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
4.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
5.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
6.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
7.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
8.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
9.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
10	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
11	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
12	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65

13	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
14	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	14,1

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA**

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.19.096.924.500	APBD

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa

ARIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina/ Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780502 200502 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Pengembangan Ekonomi Desa

ASMI RIYANDI ELVANDAR, S.Sos, M.Si
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840111 2010 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **ATIH HAYATI, AP**

Jabatan : Kepala Bidang Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai Kartanegara.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **ARIANTO, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai Kartanegara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
5. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data (E-Pantau dan SRIKANDI)

6. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji Alquran (GEMA)
7. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
8. Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKH-ASN)
9. Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
10. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya Pengentasan STUNTING
11. Penerapan Core Values ASN "BerAKHLAK"
12. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja
13. Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)
14. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah
15. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) sampai ke Pelaksana
16. Pelaksanaan Program Bidang Penataan Desa
17. melaksanakan perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data informasi merumuskan administrasi, mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja, mengkoordinasikan pengawasan, monitoring dan evaluasi penyusunan laporan, dan memberikan penilaian kinerja secara berjenjang
18. Keberhasilan dan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang

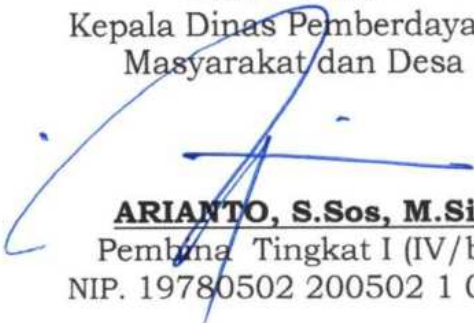
Pihak kedua

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa



ARIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780502 200502 1 003

Pihak Pertama
Kepala Bidang Penataan Desa



ATIH HAYATI, AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19760628 199412 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PENATAAN DESA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Mewujudkan capaian kinerja sesuai target terdapat dalam Dokumen RENJA 2025 dan RENSTRA TA 2021-2026	Persentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Laporan	5 Sub. Kegiatan
2.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
3.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Terlayannya Kebutuhan Dasar Masyarakat Desa melalui Fasilitasi LPJU Komunal	Poin	88,30 (Baik)
4.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Manajemen Resiko (MR)	Laporan	Triwulan I sd IV
5.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase penginputan data E-Pantau dan SRIKANDI	Laporan	5 Sub. Kegiatan
6.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12
7.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
8.	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKH-ASN)	Laporan SPT Pajak Tahunan ASN Bidang Penataan Desa	Laporan	13 ASN
9.	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Laporan E-Kinerja ASN Bidang Penataan Desa	Laporan	13 ASN
10.	Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya Pengentasan STUNTING	Ketersediaan Sarana Prasarana Air Bersih Desa (PAMSIMAS)	Laporan	193 Desa

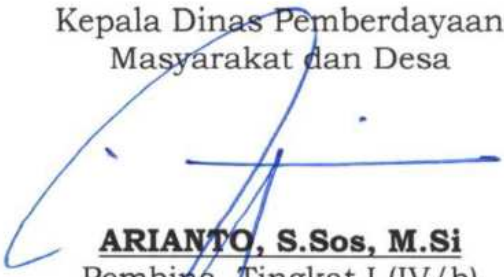
11.	Penerapan Core Values ASN “BerAKHLAK”	Apel Rutin ASN Bidang Penataan Desa	Laporan	48
12.	Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Penataan Desa	Laporan	5 Sub. Kegiatan
13.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)	Pelaksanaan Kegiatan FGD dan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Desa	Persen	100
14.	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Tata Kelola Arsip Bidang Penataan Desa	Laporan	100 dokumen
15.	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) sampai ke Pelaksana	Laporan PK & IKI ASN Bidang Penataan Desa	Laporan	13 ASN
16.	Meningkatnya Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Laporan Capaian Serapan Anggaran dan P3DN	Persen	100
17.	Pelaksanaan Program Bidang Penataan Desa	Penyusunan RKA Murni 2025	RKA	5 Sub. Kegiatan
18.	Melaksanakan perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data informasi merumuskan administrasi, mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja, mengkoordinasikan pengawasan, monitoring dan evaluasi penyusunan laporan, dan memberikan penilaian kinerja secara berjenjang	Laporan penilaian kinerja ASN secara berjenjang sampai ke pelaksana	Laporan	13 ASN

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
BIDANG PENATAAN DESA

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Penataan Desa	Rp. 84.204.248.994	APBD

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa


ARIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780502 200502 1 003

Kepala Bidang Penataan Desa


ATIH HAYATI, AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19760628 199412 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **POINO, S.IP, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai
Kartanegara.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **ARIANTO, S.Sos, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Kutai Kartanegara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa


ARIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780502 200502 1 003

Pihak Pertama
Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa


POIND, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Persen	35,42
2	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
4	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
6	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
7	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
9	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
10	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
11	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
12	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65

13	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
14	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	14,1

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.23.926.693.870	APBD

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

ARIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina / Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780502 200502 1 003

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

POINO, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LILIS SURIANI. S.Sos.M.Si

Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MOHAMMAD YUSRAN DARMA,.S.Sos.,M.Si

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;

7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Kedua,
SEKRETARIS,

MOHD. YUSRAN DARMA., S.Sos., M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19711201 199101 1 001

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI MUDA

LILIS SURIANI. S.Sos.M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19770510 200012 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tersusunnya Dokumen Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Periode Juli 2024 s/d Juni 2025	Dokumen	1
2.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Tersusunnya Dokumen Manajemen Risiko Perangkat Daerah TW I, II, III dan IV Tahun 2025	Dokumen	4
3.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Tersusunnya Dokumen SAKIP Tahun 2025	Dokumen	16
4.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2025	Dokumen	1
5.	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Kepatuhan Penyampain Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2025	Dokumen	1
6.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026	Dokumen	1
7.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025	Dokumen	1
8.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Dokumen	1
9.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2024	Dokumen	1
10.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Dokumen	4
11.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Melaksanakan Teknis Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3

12.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Melaksanakan Teknis Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3
13.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Melaksanakan Teknis Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1
14.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Melaksanakan Teknis Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1
15.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Melaksanakan Teknis Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1
16.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Melaksanakan Teknis Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Data	1
17.	Persentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Mengolah Data Indek Desa Membangun (IDM)/Indeks Desa (ID) sebagai Capaian Target Indikator Utama Perangkat Daerah	Data	1
18.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2024 TW IV dan Tahun 2025	Dokumen	1
19.	Menurunnya Prevalensi Stunting	Tersedianya Data pada Aplikasi Aksi Bangsa pelaksanaan Sub Kegiatan yang di Terteging sebagai pendukung penurunan Prevalensi Stunting	Data	1
20.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Tersedianya data pendukung Statistik Sektoral Perangkat Daerah pada Aplikasi BECIK	Data	1
21.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Tersedianya Data Laporan capaian Kinerja dan Anggaran Program, kegiatan dan Sub kegiatan pada Aplikasi EPantau	Data	1
22.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural dan Fungsional Anggaran Murni dan Perubahan Tahun 2025	Dokumen	2

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 450.000.000	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 50.000.000	APBD
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.150.000.000	APBD
4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Rp. 50.000.000	APBD
5	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Rp. 250.000.000	APBD
6	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 50.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.1.000.000.000	

Pihak Kedua,
SEKRETARIS,

MOHD. YUSRAN DARMA, .S.Sos., M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19711201 199101 1 001

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI MUDA

LILIS SURIANI. S.Sos.M.Si

Pembina (IV/a)
NIP. 19770510 200012 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HENDRA MADAN, SE**

Jabatan : **PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. POINO, S.IP., M. SI**

Jabatan : **KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah penugasan;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;

8. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
9. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting;
11. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
12. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
13. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
ADM. PEMERINTAHAN DESA


H. POINO, S.IP., M. SI
PEMBINA/(IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025
Pihak Pertama,
PENGERAK SWADAYA
MASYARAKAT


HENDRA MADAN, SE
PENATA TK. I/(III/d)
NIP. 19770903 199803 1 002

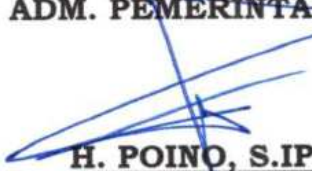
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tata kelola Arsip Perangkat Daerah (Data Korespondensi Dinas pada Aplikasi Srikandi)	Tata kelola Arsip Perangkat Daerah dengan Srikandi	Persen	100
2.	Terlaksananya Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Ketepatan Penyelesaian Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu	Dokumen	2
3.	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Penerapan Core Values ASN Berakhlak) Apel Pagi dan Apel Gabungan)	Dokumen	12
4.	Laporan E- Kinerja Bulanan dan Final	Laporan E- Kinerja Bulanan dan Final	Dokumen	13
5.	Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan	Terlaksananya Pelaporan SPT Tahunan	Dokumen	1
6.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" dan pengumpulan Zakat, Infaq sedekah pada Bidang Adm Pemerintahan Desa	Terlaksananya Gerakan Etam mengaji (GEMA), Zakat/Infaq dan Sedekah	Dokumen	13
7.	Tingkat Ketepatan waktu Input Data Realisasi Kegiatan pada Aplikasi E-PANTAU dan telah di verifikasi	Ketepatan waktu Input Data Realisasi Kegiatan pada Aplikasi E-PANTAU	Persen	100
8.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia - Tersedianya data Bidang Administrasi Pemerintahan	Data Keuangan Desa terintegrasi pada Aplikasi Keuangan Desa dan Data PADesa	Persen	80 – 100
9.	Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Pernilaian Berjenjang setiap bulan dan Final Tahunan serta melaksanakan tugas atasan	Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta Melaksanakan sesuai Perintah Atasan	Persen	100
10.	Pelaksanaan Pelayanan Konsultasi Publik	Terlaksananya pelayanan konsultasi Publik	Persen	100

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

No.	Sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lemabaga Kerajsama Desa	Rp. 800.000.000,-	APBD

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
ADM. PEMERINTAHAN DESA


H. POINO, S.IP., M. SI
PEMBINA/(IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Pertama,
PENGGERAK SWADAYA
MASYARAKAT


HENDRA MADAN, SE
PENATA TK. I/(III/d)
NIP. 19770903 199803 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Samsul Dafik, S.Sos**

Jabatan : **Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Ahli Muda**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Asmi Riyandi Elvandar, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan Capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja [RENJA] Tahun 2025 dan Rencana Strategis [RENSTRA] Tahun 2021 – 2026 yang Telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci [IKK] yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi public, tindak lanjut pengaduan Masyarakat, Indeks kepuasan Masyarakat dan Indeks pelayanan public;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan [BPK]/ Inspektur Daerah ;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah [SPIP] yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan Mendorong inovasi dalam Upaya percepatan Pembangunan secara efektif dan efisien;

7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan public yang efektif, responsive, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N – LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik ;
8. Terwujudnya pengelolaan Data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggung jawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan yang berbasis data;
9. Terwujudnya ASN yang religis, berakhlak mulia dan cinta AL-QUR'AN Melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
10. Tercapainya Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Upaya pengentasan stunting
12. Berkomitmen melaksanakan Upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke perangkat Daerah dan pengampu Indikator Kinerja tim penyusun monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja kabupaten kutai kartanegara”;
14. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa

Asmi Riyandi Elvandar, S.Sos., M.Si

Penata Tingkat I
NIP. 19840111 201101 1 002

Pihak Pertama,
Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Ahli
Muda

Samsul Dafik, S.Sos

Penata Tingkat I
NIP. 19731231 199803 1 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN/URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat kepatuhan terinfutnya Data pada Aflikasi E-Pantau untuk sub keg identifikasi dan inventarisasi Masyarakat hukum Adat dan korespodensi surat menyurat bersipat kedinasan pada aflikasi SRIKANDI	Jumlah Data kegiatan /sub keg yg terinfut pada aplikasi E Pantau dan Jumlah Surat dinas pada bidang	Aplikasi	laporan,d ata,doku men
2	Tingkat kepatuhan terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yg bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupate/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yg masyarakatnya pelaku hukum adat yg sama dalam daerah kab/kota	jumlah terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yg bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kab/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yg masyarakatnya pelaku hukum adat yg sama dalam daerah kab/kota	kegiatan/ data/lapor an/dokum en	12 bulan
3	Tingkat kepatuhan terlaksananya penyelenggaraan satu data indonesia pada bidang Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa	Persentase Keterinfutan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
4	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Gerakan Etam Mengaji'GEMA' di Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Jumlah Laporan pelaksanaan 'Gerakan Etam Mengaji'GEMA'	Laporan	48

NO	SASARAN/URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Tingkat kepatuhan pelaporan manajemen resiko bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa dan sub kegiatan identifikasi dan inventarisasi masyarakat Hukum adat tahun 2025	Tersusunnya Dokumen Manajemen resiko pada Bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa	Dokumen	Per semester
6	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Koordinasi perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data/informasi, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi serta penilaian secara berjenjang	Jumlah koordinasi perumusan alternatif, kebijakan daerah berbasis data, informasi melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, serta penilaian secara berjenjang	Kegiatan/ data/laporan/dokumen	12 Bulan
7	Tingkat Kepatuhan terlaksananya sistem pengendalian intern pemerintah [SPIP] Di Bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa Kepatuhan Data pada Aplikasi E Pantau [untuk sub.kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi masyarakat Hukum adat] dan korepondensi surat menyurat bersipat kedinasan pada Aplikasi SRIKANDI	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	level	3
8	Tingkat Kepatuhan terlaksananya kegiatan prevalensi stunting sesuai dengan program dan Kegiatan pada Bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa	Prevalensi Stunting	Persen	14,1
9	Tingkat Kepatuhan terwujudnya Peningkatan Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	88,30 baik

NO	SASARAN/URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Tingkat Kepatuhan terlaksananya dan terwujudnya partisipasi perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah inovasi perangkat daerah	Inovasi	1
11	Tingkat kepatuhan terlaksananya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Forum konsultasi Fublik di Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan ekonomi desa	persentase pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil forum Konsultasi publik [PKP]	Persen	100

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa

Pihak Pertama,
Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Ahli Muda

Asmi Riyandi Elvandar, S.Sos., M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19840111 201101 1002

Samsul Dafik, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19731231 199803 1 017

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Perangkat Daerah
 2. Jabatan
 3. Tugas
 4. Fungsi
-
- : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai Kartanegara
 - : Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Ahli Muda
 - : Mempelajari, merumuskan, mengklasifikasikan, menyusun, mengolah dan melaksanakan rencana obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan dan pedoman pimpinan dalam pembuatan kebijakan.
- 1 Terinfutnya Data pada Aplikasi E-Pantau (untuk sub,keg identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum adat)dan korespodensi surat menyurat bersipat kedinasan pada Aplikasi SRIKANDI
 - 2 Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yg bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga adat tingkat daerah kab/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yg masyarakatnya pelaku hukum adat yg sama dalam daerah kab/kota
 - 3 Tingkat Kepatuhan terlaksananya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Pada Bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa
 - 4 Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji'GEMA' di Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa khususnya di Bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa
 - 5 Tersusunnya Dokumen Manajemen Risiko pada Bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa
 - 6 Jumlah Koordinasi perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data informasi,melakukan perencanaan,monitoring,evaluasi serta penilaian secara berjenjang
 - 7 Terlaksananya sistem pengendalian intern pemerintah' SPJP di Bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa
 - 8 Terlaksananya kegiatan prevalensi stunting sesuai dengan program dan kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa
 - 9 Indeks kepuasan masyarakat [IKM]
 - 10 Terlaksana dan terwujudnya partisipasi perangkat daerah dalam pekan inovasi Daerah
 - 11 Persentase pelaksanaan,pelaporan, dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Tingkat kepatuhan terinfutnya data pada Aplikasi E- Pantau (untuk sub keg identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat) dan korespodensi surat menyurat bersipat kedinasan pada aplikasi SRIKANDI	Jumlah data kegiatan/sub kegiatan yang terinfut pada aplikasi E-Pantau dan Jumlah Surat pada Bidang	$\frac{\text{Jumlah data yang tersusun}}{\text{Target data yang tersusun}} \times 100 = \text{Persentase capaian kinerja}$	Aplikasi E-Pantau dan Aplikasi SRIKANDI
2	Tingkat kepatuhan terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yg bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kab/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yg msyarakatnya pelaku hukum adat yg sama dalam daerah kab/kota	Jumlah pemberdayaan yg dilaksanakan lembaga kemasyarakatan yg bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kab/kota serta pemberdayaan masyarakat yg msyarakatnya pelaku hukum adat yg sama dalam daerah kab/kota	$\frac{\text{Jumlah data yg tersusun}}{\text{Target data yang tersusun}} \times 100 = \text{Persentase capaian kinerja}$	DPMD,Kecamatan,Desa
3	Tingkat kepatuhan terlaksananya penyelenggaraan satu data indonesia pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa	persentase Keterinfutan Data pada Satu Data indonesia	$\frac{\text{Jumlah data yang tersusun}}{\text{Target data yang tersusun}} \times 100 = \text{persentase capaian kinerja}$	Kecamatan,Desa

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	SUMBER DATA
4	Tingkat kepatuhan terlaksananya gerakan etam mengaji'GEMA' didinas pemberdayaan masyarakat dan desa khususnya dibidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan 'Gerakan Etam Mengaji'GEMA	Jumlah data yang tersusun target data yang tersusun x 100 persentase capaian kerja	DPMD dan Bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa
5	Tingkat Kepatuhan pelaporan manajemen resiko bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa dan sub identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat tahun 2025	Tersusunnya dokumen manajemen resiko pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa	Jumlah data yang tersusun Target data yang tersusun x 100 persentase capaian kerja	DPMD dan Bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa
6	Tingkat kepatuhan terlaksananya koordinasi perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data informasi,melakukan perencanaan,pelaksanaan monitoring,evaluasi serta penilaian secara berjenjang	Jumlah koordinasi perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data informasi,melakukan perencanaan,monitoring,ev aluasi serta penilaian secara berjenjang	jumlah data yang tersusun Target data yang tersusun x 100 Persentase capaian kinerja	DPMD dan bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	SUMBER DATA
7	Tingkat kepatuhan terlaksananya sistem pengendalian intern pemerintah SPIP di Bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa	Nilai maturitas SPIP pada perangkat daerah	Jumlah data yang tersusun Target data yang tersusun $\times 100$ persentase capaian kinerja	DPMD dan Bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa
8	Tingkat kepatuhan terlaksananya kegiatan prevalensi stunting sesuai dengan program dan kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa	Pravelensi Stunting	Jumlah data yang tersusun Target data yang tersusun $\times 100$ persentase capaian kinerja	DPMD,KECAMATAN,DESA
9	Tingkat kepatuhan terwujudnya peningkatan kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah data yang tersusun Target data yang tersusun $\times 100$ Persentase capaian kinerja	Kecamatan/ Desa/ Masyarakat
10	Tingkat kepatuhan terlaksana dan terwujudnya partisipasi perangkat daerah dalam pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah data yang tersusun Target data yang tersusun $\times 100$ Persentase capaian kinerja	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	SUMBER DATA
11	Tingkat kepatuhan terlaksananya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Persentase pelaksanaan ,pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	$\frac{\text{Jumlah data yang tersusun}}{\text{Target data yang tersusun}} \times 100$ Persentase Capaian Kerja	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa/DPMD

Kutai Kartanegara, 21 JANUARI 2025

Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Ahli

Muda


Samsul Dafik, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19731231 199803 1 017

PENGUKURAN KINERJA

1. PERANGKAT DAERAH

2. JAFUNG/PELAKSANA

3 TAHUN

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KUTAI KARTANEGARA

: Pengolah Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

: 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tingkat kepatuhan terinfutnya Data pada aplikasi E-Pantau (untuk sub.kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum adat dan Korespondensi Surat Menyurat bersipat kedinasan pada aflikasi SRIKANDI	Jumlah Data Kegiatan/sub kegiatan yg terinfut pada aplikasi E- Pantau dan Jumlah surat Dinaspada Bidang	laporan / Data/ dokumen.12 bulan	laporan / Data/ dokumen.12 bulan	100 %
2	tingkat kepatuhan terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desadan lembaga adat tingkat daerah kab /kota serta pemberdayaan masyarakat Hukum Adat yg masyarakatnya pelakunya Hukum adat yg sama dalam daerah kab/kota	jumlah terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yg bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kab/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yg masyarakatnya pelakunyahukumadat yg sama dalam daerah kab/kota	kegiatan/ data/ laporan/ dokumen 12 bulan	kegiatan/ data/ laporan/ dokumen 12 bulan	100 %
3	Tingkat kepatuhan terlaksananya penyelenggaraan satu data indonesia pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa	Persentase Keterinfutan Data pada Satu Data Indonesia	100%	100%	100 %
4	Tingkat Kepatuhan Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan khususunya di Bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa	Jumlah laporan Pelaksanaan 'Gerakan Etam Mengaji' GEMA	48 Laporan	48 Laporan	1,00 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5	Tingkat kepatuhan pelaporan manajemen resiko Bidang pemberdayaan Masyarakat dan pengembangan ekonomi desa dan sub keg identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat tahun 2025	Tersusunnya dokumen manajemen risiko pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa	Dokumen/ per semester	Dokumen/ per semester	100 %
6	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Koordinasi perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data informasi, melakukan perencanaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi serta penilaian secara berjenjang	Jumlah Koordinasi perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data informasi, melakukan perencanaan, pelaksanaan monitoring ,evaluasi serta penilaian secara berjenjang	kegiatan /data/lapo ran/dokumen 12 bulan	kegiatan /data/la poran/dokumen 12 bulan	100 %
7	Intern Pemerintah(SPIP)di pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	level 3	level 3	100 %
8	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Kegiatan prevalensi stunting sesuai dengan Program dan Kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa	Prevalensi Stunting	persen (14,1)	persen (14,1)	100 %
9	Tingkat Kepatuhan terwujudnya Peningkatan Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	POIN 88,30 BAIK	POIN 88,30 BAIK	100 %
10	Tingkat kepatuhan terlaksana dan terwujudnya Partisipasi Perangkat Daerah partisipasi perangkat daerah dalam pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1 INOVASI	1 INOVASI	100 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
11	Tingkat kepatuhan terlaksananya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa	Persentase Pelaksanaan, pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	100	100	100 %

Kutai Kartanegara, 21 JANUARI 2025

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa


ASMI RIYANDI ELVANDAR, S. Sos. M. Si

Penata Tingkat I

NIP. 19840111 201101 1 002

Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Ahli Muda


SAMSUL DAFIK, S.SOS

Penata Tingkat I

NIP. 19731231 199803 1 017



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anita Hefiana, Sos.,M.Si

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Asmi Riyandi Elvandar, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara;
2. Melaksanakan Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Melaksanakan Penyusunan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa;
4. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa;
5. Melaksanakan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota;
6. Melaksanakan Peningkatan Kepuasan Masyarakat;

7. Melaksanakan Kegiatan Prevalensi Stunting sesuai dengan Program dan Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa;
8. Melaksanakan Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah;
9. Melaksanakan Penyusunan laporan Manajemen Resiko Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Ekonomi Kegiatan dan Sub Kegiatan;
10. Melaksanakan Penyusunan perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi,,Melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta penilaian secara berjenjang;
11. Melaksanakan Penyusunan data pada aplikasi E-Pantau dan korespondensi surat menyurat bersifat kedinasan pada aplikasi Srikandi;
12. Melaksanakan Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa;

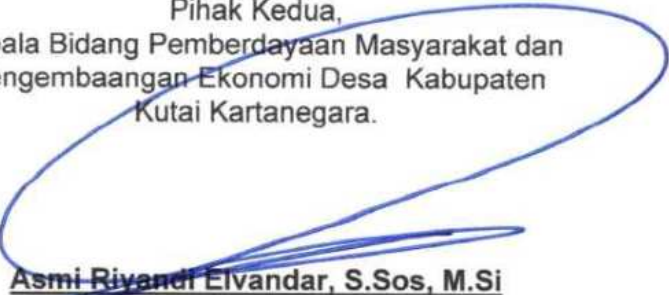
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

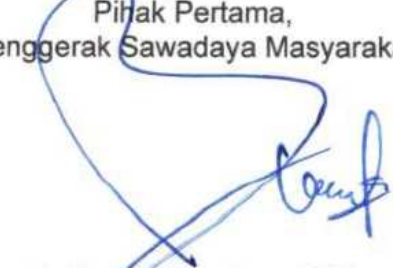
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Pengembangan Ekonomi Desa Kabupaten
Kutai Kartanegara.


Asmi Riyandi Elvandar, S.Sos, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19760628 199412 1 001

Pihak Pertama,
Penggerak Sawadaya Masyarakat


Anita Hefiana, Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19740304 200012 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase	80-100
		Terlaksannaya penyusunan lapoaran Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Laporan	1
		Prosentase pelaksanaan kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase	80-100
		Tersusunnya Laporan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Laporan	1
		Prosentase Data Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase	80-100
		Tindak lanjut pelaporan kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	1

		Prosentase pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan endayagunaan Kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Prosentase	80-100
		Ketersediaan Laporan kegiatan Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan endayagunaan Kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Laporan	1
2	Terlaksananya Kegiatan Prevalensi Stunting sesuai dengan Program dan Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Terlaksananya Pembangunan Gedung/ Sekretariat Posyandu	Unit	14
		Tersusunnya Dokumen Fasilitas Kegiatan Tim Pembina Posyandu	Dokumen	1
		Tersusunnya Dokumen Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	Dokumen	1
		Terlaksananya Fasilitas Sarana dan Prasarana Posyandu	Unit	154
3	Mengkoordinasikan perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi,,Melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta penilaian secara berjenjang	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berupa Perjanjian Kinerja dan tersajinya Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen	1
		Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Laporan	1
		Jumlah Dokumen Penilaian Berjenjang pada Aplikasi EKINERJA bulanan dan Tahunan	Dokumen	13
		Waktu pelaksanaan Penilaian Berjenjang	Bulan	12
		Dokumen Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja dan Pengukuran Kinerja Murni Dan Perubahan	Dokumen	1
		Waktu Penyusunan Perjanjian Kinerja beserta turunannya	Bulan	3

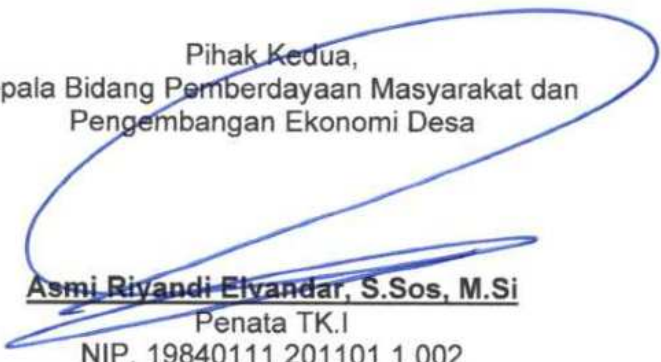
4		Penyusunan data Persentase Posyandu Aktif	Dokumen Data	1
		Penyusunan data Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Dokumen Data	1
		Penyusunan data Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Dokumen Data	1
		Penyusunan data Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Dokumen Data	1
		Penyusunan data Jumlah Posyandu	Dokumen Data	1
		Penyusunan data Jumlah lembaga kemasyarakatan	Dokumen Data	1
		Penyusunan data Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Aktif/Melaksanakan Kegiatan-kegiatan Secara Rutin	Dokumen Data	1
		Penyusunan data Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)Kelurahan yang Aktif/Melaksanakan Kegiatan-kegiatan Secara Rutin	Dokumen Data	1
		Penyusunan data jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa/Kelurahan di Kecamatan	Dokumen Data	1
		Penyusunan data Jumlah RT yang Aktif/Melaksanakan Kegiatan-kegiatan Secara Rutin	Dokumen Data	1
		Penyusunan data Jumlah PKK yang Aktif/Melaksanakan Kegiatan-kegiatan Secara Rutin	Dokumen Data	1
		Penyusunan data Persentase Tingkat Perkembangan Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen Data	1
5	Mewujudkan Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)/Lembaga adat / posyandu dan yang terkait dengan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pengembangan Ekonomi	Persen	100
6	Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Mengikuti kegiatan Rakor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Laporan	1

		Tersusunnya Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Per Semester	4
7	Tersusunnya data pada aplikasi E-Pantau dan korespondensi surat menyurat bersifat kedinasan pada aplikasi Srikandi	Jumlah Tata Kelola Naskah Dinas Pada Aplikasi SRIKANDI	Jumlah Surat yang terinput	48
		Waktu terlaksannaya Tata Kelola naskah pada Aplikasi SRIKANDI	Bulan	12
		Jumlah Data kegiatan yang di input dan di Upload Pada Apk E-Pantau	Kegiatan	4
		Waktu Pelaksanaan input data pada Aplikasi EPANTAU	Bulan	12
8	Terwujunya Peningkatan Kepuasan Masyarakat	Jumlah Indeks kepuasan masyarakat pada Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Data Survey	1
		Jumlah data kepuasan masyarakat Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Data Survey	1
9	Terlaksananya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1 Inovasi	1
10	Tersusunnya laporan Manajemen Resiko Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Ekonomi Kegiatan dan Sub Kegiatan	Penyusunan dokumen Manajemen Risiko pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Dokumen	1
		Ketepatan waktu penyusunan dokumen Manajemen Risiko pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Per Triwulan	4

11	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Laporan	12
----	--	---	---------	----

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Pengembangan Ekonomi Desa


Asmi Riyandi Elvandar, S.Sos, M.Si
Penata TK.I
NIP. 19840111 201101 1 002

Pihak Pertama,
Penggerak Swadaya Masyarakat


Anita Hefiana, Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19740304 200012 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heriansyah, SH
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dedy Surianto, SE
Jabatan : Kepala Bidang Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

1. Tersusunnya Dokumen manajemen Resiko perangkat daerah TW I,II,III dan IV tahun 2025;
2. Tersusunnya tata kelola arsip pada Aplikasi Srikandi;
3. Tersusunnya Dokumen FGD Perkembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
4. Tersusunnya Teknis Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengembangan Kawasan Perdesaan;
5. Tersusunnya realisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang di fasilitasi;
6. Tersusunnya data laporan capaian kinerja dan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan pada Aplikasi E-Pantau;
7. Tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2024 TW IV dan Tahun 2025;
8. Mengolah Perjanjian Kinerja Pejabat Fungsional di Bidang Kerjasama Desa Tahun 2025;
9. Terlaksanannya "Gerakan Etam Mengaji di Bidang Kerjasama Desa;
10. Mengolah Kepatuhan Penyampain Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2025;
11. Tersusunnya Dokumen SAKIP Tahun 2025;
12. Tersusunnya data Inovasi upaya percepatan Pembangunan secara efektif dan efisien;
13. Tersusunnya Data Kesepakatan Kerja Sama di Kawasan Perdesaan;

14. Terpenuhinya survey layanan kepuasan masyarakat;

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang:

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 07 Februari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Kerjasama Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa



DEDY SURIANTO, SE

Pembina

NIP. 19711112 199703 1 005

Pihak Pertama,
Penggerak Swadaya Masyarakat



HERIANSYAH, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760616 200112 1 003

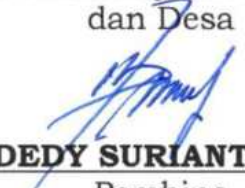
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN/URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyusun Dokumen manajemen Resiko perangkat daerah TW I,II,III dan IV tahun 2025;	mengolah dokumen manajen resiko perangkat daerah TW I,II,III dan IV tahun 2025	Bulan	12
2	Tersusunnya tata kelola arsip pada Aplikasi Srikandi;	mengolah tata kelola arsip pada Aplikasi Srinadi	Bulan	12
3	Tersusunnya Dokumen FGD Pengembangan Kawasan Perdesaan;	mengolah dokumen FGD Pengembangan Kawasan Perdesaan	dokumen	12
4	Tersusunnya Realisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang di fasilitasi;	Realisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang di fasilitasi;	laporan	1
5	Tersusunnya data laporan capaian kinerja dan anggaran program,kegiatan dan sub kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan pada Aplikasi E-Pantau;	Mengolah data laporan capaian kinerja dan anggaran program,kegiatan dan sub kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan pada Aplikasi E-Pantau;	laporan	12
6	Tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2024 TW IV dan Tahun 2025;	Mengolah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2024 TW IV dan Tahun 2025;	dokumen	1
7	Tersusunnya Perjanjian Kinerja Pejabat Fungsional di Bidang Kerjasama Desa Tahun 2025;	Mengolah Perjanjian Kinerja Pejabat Fungsional di Bidang Kerjasama Desa Tahun 2025;	laporan	1

NO	SASARAN/URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Terlaksanannya "Gerakan Etam Mengaji di Bidang Kerjasama Desa;	Melaksanannya "Gerakan Etam Mengaji di Bidang Kerjasama Desa;	laporan	12
9	Tersusunnya Kepatuhan Penyampain Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2025	Mengolah Kepatuhan Penyampain Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2025	laporan	1
10	Tersusunnya Dokumen SAKIP Tahun 2025;	Menyusun Dokumen SAKIP Tahun 2025;	dokumen	1
11	Tersusunnya Data Kesepakatan Kerja Sama di Kawasan Perdesaan;	Mengolah Data Kesepakatan Kerja Sama di Kawasan Perdesaan;	laporan	1
12	Tersusunnya data Inovasi upaya percepatan Pembangunan secara efektif dan efisien;	Mengolah data Inovasi upaya percepatan Pembangunan secara efektif dan efisien;	data	1
13	Tersusunnya Data Kesepakatan Kerja Sama di Kawasan Perdesaan;	Mengolah Data Kesepakatan Kerja Sama di Kawasan Perdesaan;	dokumen	1
14	Terpenuhinya survey layanan kepuasan masyarakat;	Terpenuhinya survey layanan kepuasan masyarakat;	dokumen	1

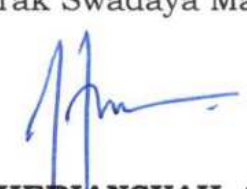
Kutai Kartanegara, 07 Februari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Kerjasama Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa


DEDY SURIANTO, SE

Pembina
NIP. 19711112 199703 1 005

Pihak Pertama,
Penggerak Swadaya Masyarakat


HERIANSYAH, SH

Penata Tingkat I
NIP. 19760616 200112 1 003

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUAPETN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp 250.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp 250.000.000	

Kutai Kartanegara, 07 Februari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Kerjasama Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa


DEDY SURIANTO, SE
Pembina
NIP. 19711112 199703 1 005

Pihak Pertama,
Penggerak Swadaya Masyarakat


HERIANSYAH, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760616 200112 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KARTIKA SARI, A.Ma.Pd**

Jabatan : **KEPALA SUBBAG UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MOHAMMAD YUSRAN DARMA, S.Sos.,M,Si,**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

MOHAMMAD YUSRAN DARMA, S.Sos., M.Si,

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197112011991011001

Pihak Pertama
Kasubbag Umum Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian

KARTIKA SARI, A.Ma.Pd

PENATA TK. I (III/d)
NIP. 197205191993062001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBBAG UMUM KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

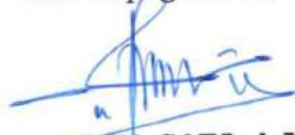
No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat per semester	Jumlah Laporan SKM	Laporan	1 Laporan
2	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko Subbagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian per Triwulan, SP4N LAPOR	Jumlah Laporan Manajemen Risiko	Laporan	4
3	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
4	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN/P3K/Non ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas berdasarkan tugas dan fungsi	orang	151
5	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Naik Pangkat, Usul KGB, Usul Pensiun, Cuti, Usul Penghargaan Satya Lencana	Orang	63
6	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Rekapitulasi presensi Pegawai, Pengembangan Kompetensi kepegawaian, Pemberian Sanksi.	Dokumen /Laporan	12
7	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen /Laporan	212
8	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Barang Milik Daerah yang disediakan	Unit	10
9	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	14
10	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	97
11	Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahan	Jumlah SKP Bawahan	Orang	13
12	Terlaksananya penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Dokumen Kinerja Pelaksaksana (Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu)	Jumlah Dokumen Anjab ABK, Dokumen Kinerja Pelaksana	Dokumen	26

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

MOHAMMAD YUSRAN DARMA, S.Sos., M.Si,
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197112011991011001

Pihak Pertama
Kasubbag Umum Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian


KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
PENATA TK. I (III/d)
NIP. 197205191993062001

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
KASUBBAG UMUM KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	KEGIATAN	Anggaran	Ket
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 318.000.000	APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 10.242.594.300	APBD
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 257.375.000	APBD
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.809.362.892	APBD
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 523.900.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp 13.151.232.192	

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

MOHAMMAD YUSRAN DARMA, S.Sos.,M.Si,
Pembina Tingkat I (IV/b
NIP. 197112011991011001

Pihak Pertama
Kasubbag Umum Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian

KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
PENATA TK. I (III/d)
NIP.197205191993062001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JULPIANSYAH, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MOHAMMAD YUSRAN DARMA, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 pada Perangkat Daerah;
2. Menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan melaporkan pengelolaan Barang Milik daerah yang berada di Pengguna Barang Milik daerah;
4. Melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan tata kelola arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan ketersediaan data dan informasi pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

8. Membuat inovasi dan atau dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi Perangkat Daerah;
9. Terealisasi output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan manajemen resiko terhadap program kegiatan di Perangkat Daerah;
12. Melaksanakan Review awal terhadap indicator kinerja utama Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP Tahun;
15. Tercapainya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan;
16. Pemenuhan target pendapatan daerah;
17. Melaksanakan monitor Centre For Prevention KPK;
18. Melaksanakan koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kabupaten;
19. Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah ;
20. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja kepada atasan langsung;
21. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Mohammad Yusfan Darma, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 19711201 199101 1 001

Tenggarong, 21 Januari 2025
Kepala Sub Bagian Keuangan
dan Aset

Julpiansyah, S.Sos, M.Si

Pembina IV/a
NIP. 19740901 2007011015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersusunnya dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1
2	Tersusunnya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	Laporan	1
3	Terpenuhinya gaji dan tunjangan aparatur perangkat daerah	Jumlah aparatur yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Orang	102
4	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Laporan	18
5	Menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)/ Inspektorat daerah	Temuan hasil pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti	Temuan	1
6	Melaksanakan dan melaporkan pengelolaan Barang Milik daerah yang berada di Pengguna Barang Milik daerah	Persentase pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada Pengguna Barang	Persen	100
7	Melaksanakan pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persen	100)
8	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKPN dan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100

9	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
10	Meningkatnya pemenuhan ketersediaan data dan informasi pembangunan berdasarkan fungsi perangkat daerah	Persentase keterisian data dan informasi di Satu Data Kutai Kartanegara dan Aplikasi E-Pantau	Persen	100
11	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah inovasi yang dibuat	Persen	100
12	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah dokumentasi Gerakan Etam Mengaji	Dokumentasi	48

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mohammad Yusran Darma, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 19711201 199101 1 001

Tenggarong, 21 Januari 2025
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Julpiansyah, S.Sos, M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19740901 2007011015



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD IRJII, SE., M.Si**

Jabatan : **Penggerak Swadaya Masyarakat**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ARIANTO, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
3. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026;
4. Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah;
5. Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
6. Menurunnya Prevalensi Stunting;

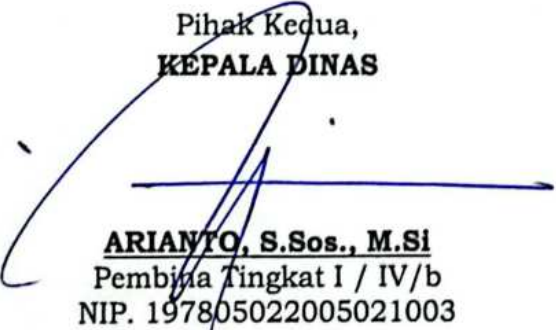
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

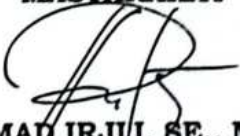
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS


ARIANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 197805022005021003

Pihak Pertama,
**PENGERAK SWADAYA
MASYARAKAT**


AHMAD IRJII, SE., M. SI
Pembina (IV/a)
NIP. 19681202 200604 1 008

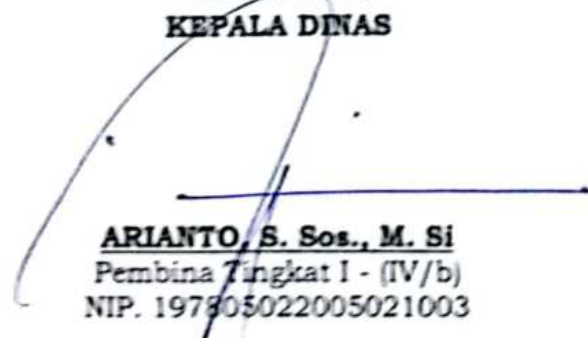
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" Prosentase Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji" (GEMA) ketepatan waktu penyampaian laporan	Kegiatan Persen bulan	1 100% 12
2.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan	kegiatan Persen Bulan	1 100% 12
3.	Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026;	kegiatan yang dilaksanakan Meningkatnya kualitas pembangunan desa waktu pelaksanaan kegiatan	kegiatan Persen Bulan	1 100 12
4.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah;	kegiatan yang dilaksanakan Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Kegiatan Persen	1 100%

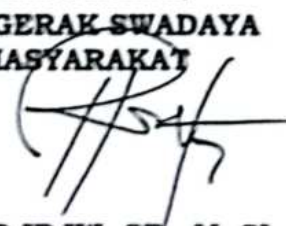
		waktu pelaksanaan kegiatan	Bulan	12
5.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	1
		Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100%
		Ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan	Bulan	12
6.	Menurunnya Prevalensi Stunting	kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	1
		persentase Prevalensi Stunting	Persen	100%
		Ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan	Bulan	12

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS


ARIANTO, S. Sos., M. Si
Pembina Tingkat I - (IV/b)
NIP. 197805022005021003

Pihak Pertama,
PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT


AHMAD IRJI, SE., M. SI
Pembina - (IV/a)
NIP. 19681202 200604 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **AJI NAZARUDIN, S.Sos**
Jabatan : Analis Pengembangan SDM Aparatur
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **H. POINO, S.IP., M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai
Kartanegara.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;

7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Kepala Bidang
Administrasi Pemerintahan Desa

Analisis Pengembangan SDM Aparatur



POINO, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001



AJI NAZARUDIN, S.Sos
Penata III/c
NIP. 19790114 1999031 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD melalui peningkatan Kapasitas	Kegiatan	2
2.	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas SPT Tahunan	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per tanggal 31 Maret setiap tahunnya	Persen	100
3.	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan setiap tahun	Persen	100
4.	Terlaksananya Kepatuhan Input E-Pantau	Tingkat ketepatan waktu Input E-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
5.	Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Terlaksananya Tata Kelola Arsip pada Aplikasi Srikandi	Persen	100
6.	Penerapan Core Values ASN "BerAKHLAK"	Internalisasi Core Values ASN "BerAKHLAK"	Persen	100
7.	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
8.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
9.	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah per triwulan	Persen	100
10.	Tersedianya data Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Ketersediaan Data BPD, Laporan Kinerja BPD dan Produk Hukum Desa	Persen	80
11.	Manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Penggunaan Aplikasi SIPD dalam Penatausahaan Keuangan	Persen	100
12.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" dan pengumpulan Zakat, Infaq sedekah pada Bidang Adm Pemerintahan Desa	Terlaksananya GEMA dan kewajiban Zakat/Infaq	Laporan	12
13.	Terlaksananya perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi bidang pemerintahan desa	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah satu Data	Persen	100

		Kukar melalui Aplikasi Srikandi		
14.	Terwujudnya Rumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi Bidang Pemerintahan Desa	Melaksanakan Tugas Atasan	Persen	100

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp. 300.000.000,-	APBD
2.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp. 200.000.000,-	APBD

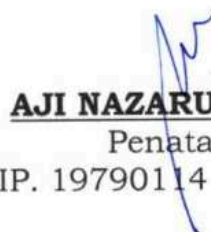
Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Kepala Bidang
Admoinistrasi Pemerintahan Desa



POINO, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Analisis Pengembangan SDM Aparatur



AJI NAZARUDIN, S.Sos
Penata III/c
NIP. 19790114 1999031 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ERNANI, S. Sos**

Jabatan : **ANALIS KELEMBAGAAN MASYARAKAT**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ASMI RIYANDI ELVANDAR, S. Sos. M. Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA.**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna

mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

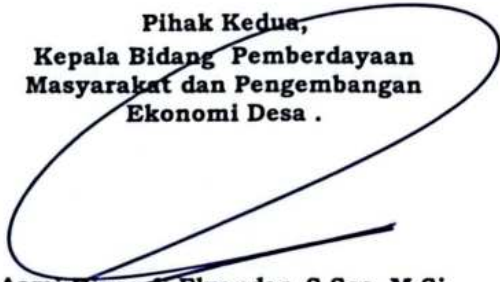
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa .


Asmi Riyandi Elvandar, S.Sos, M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 1984011 201001 1 002

Pihak Pertama,
Analisis Kelembagaan Masyarakat


ERNANI, S. Sos.
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19830611 200902 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tingkat Kepatuhan terinputnya Data pada Aplikasi E Pantau (untuk sub. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat) dan Korespondensi Surat Menyurat bersifat Kedinasan pada Aplikasi SRIKANDI.	Jumlah Data Kegiatan / Sub kegiatan yang terinput pada aplikasi E-Pantau dan Jumlah Surat Dinas Pada bidang	Aplikasi	Laporan/ Data/ Dokumen
2.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak diBidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak diBidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Kegiatan/ Data/ Laporan/ Dokumen	12 Bulan
3.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa .	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
4.	Tingkat Kepatuhan Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Khususnya Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa.	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
5.	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Manajemen Resiko Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa dan Sub. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Tahun 2025	Tersusunnya dokumen Manajemen Risiko pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Dokumen	Per Semester

6.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Koordinasi perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data informasi, melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta penilaian secara berjenjang.	Jumlah Koordinasi perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data informasi, melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta penilaian secara berjenjang.	Kegiatan/ Data/ Laporan/ Dokumen	12 Bulan
7.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
8.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Kegiatan Prevalensi Stunting sesuai dengan Program dan Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Prevalensi Stunting	Persen	14,1
9.	Tingkat Kepatuhan terwujudnya Peningkatan Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
10.	Tingkat Kepatuhan terlaksana dan terwujudnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
11.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa**

Asmi Riyandi Elvandar, S.Sos, M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 1984011 201001 1 002

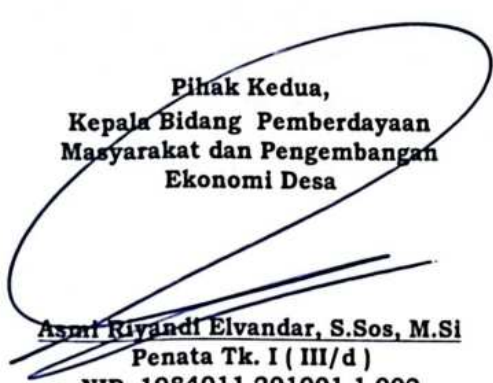
**Pihak Pertama,
Analisis Kelembagaan Masyarakat**

ERNANI, S. Sos.
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19830611 200902 2 003

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Rp. 150.000.000	APBD

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa


Asmi Riyandi Elvandar, S.Sos, M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 1984011 201001 1 002

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama,
Analisis Kelembagaan Masyarakat


ERNANI, S. Sos.
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19830611 200902 2 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOHAMMAD ADRIANNUR**

Jabatan : **PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ASMI RIYANDI ELVANDAR, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

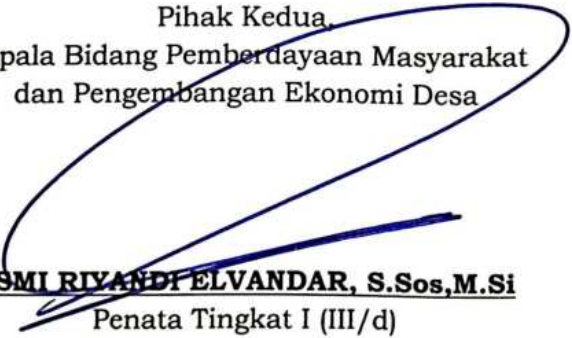
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Pengembangan Ekonomi Desa


ASMI RIVANDI ELVANDAR, S.Sos,M.Si

Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840111 2010 1 002

Pihak Pertama,
Pengelola Monitoring dan Evaluasi


MOHAMMAD ADRIANNUR

Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 19671007 199603 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tingkat kepatuhan terinfutnya data pada aplikasi E-Pantau (untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan korespondensi surat menyurat bersifat kedinasan pada aplikasi Srikandi	Jumlah data kegiatan/sub kegiatan yang terinfut pada Aplikasi E-Pantau dan jumlah surat dinas pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Aplikasi	Laporan dan Dokumen
2.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12 Laporan
3.	Tingkat Kepatuhan terlaksana dan terwujudnya partisipasi perangkat daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
4.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya penyelenggaraan satu data Indonesia pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Persentase keterinfutan data pada satu data Indonesia	Persen	100

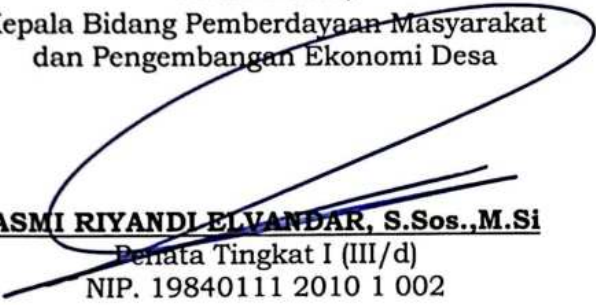
5.	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Manajemen Resiko Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa dan Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna tahun 2025	Tersusunnya Dokumen Manajemen Resiko pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Dokumen	Triwulan
6.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Level	3
7.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan/Data/Laporan/Dokumen	12 Bulan

8.	Tingkat Kepatuhan terwujudnya Peningkatan Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
9.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Koordinasi perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data informasi, melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta penilaian secara berjenjang	Jumlah Koordinasi Perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data, informasi, melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta penilaian secara berjenjang	Kegiatan/data/Laporan /Dokumen	12 Bulan
10.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Kegiatan Prevalensi Stunting sesuai dengan Program dan Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Prevalensi Stunting	Persen	14,1
11.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Persentase Pelaksanaan Pelaporan dan Tindak lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100

Kutai Kartanegara

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Pengembangan Ekonomi Desa


ASMI RIYANDI ELVANDAR, S.Sos., M.Si

Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840111 2010 1 002

Pihak Pertama,
Pengelola Monitoring dan Evaluasi


MOHAMMAD ADRIANNUR

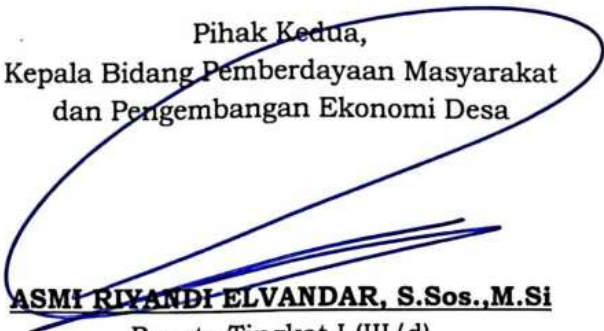
Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 19671007 199603 1 004

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No	Kegiatan	Anggaran	KETERANGAN
1.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp. 643.360.500,-	APBD

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Pengembangan Ekonomi Desa


ASMI RIYANDI ELVANDAR, S.Sos., M.Si

Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840111 2010 1 002

Pihak Pertama,
Pengelola Monitoring dan Evaluasi


MOHAMMAD ADRIANNUR

Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 19671007 199603 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **SOPIAN NUR, S.Sos**
Jabatan : Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai
Kartanegara.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **POINO, S.IP, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai
Kartanegara.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa



POINO, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama
Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Desa



SOPIAN NUR, S.Sos
Penata TK I (III/d)
NIP. 19680825 200012 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Penggunaan Srikandi	Persen	100
2	Penyampaian LHKPN dan SPT tahunan	Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT 100% paling lambat akhir bulan februari setiap tahun	Persen	100
3	Terlaksannya Dokuemn Pedoman APBDesa	Tersedianya pedoman Apbdesa bagu Desa	Desa	193
4	Ketersediaan Laporan Dokumen Manajemen Resiko bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Pemenuhan ketersediaan data e -pantau	Persen	100
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
6	Menurunnya Prevalensi Stunting - Terlaksananya Program Aparatur Bahagia	Terwujudnya aparatur desa yang berbahagia dengan BPJS Kesehatan	Persen	14,1
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia - Tersedianya data Bidang Administrasi Pemerintahan	Kersedianya data peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagan Kerjaan	Persen	100
8	novasi Perangkat Daerah dan Indeks Inovasi Daerah	Terlaksananya Penggunaan Aplikasi SIPD	Persen	100
9	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia - Tersedianya data Bidang Administrasi Pemerintahan	tersediannya data keuangan Desa	Lapora n	48
10	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia - Tersedianya data Bidang Administrasi	Tersedianya data penegasan dan penetapan batas desa	Lapora n	10

	Pemerintahan			
11	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" dan pengumpulan Zakat, Infaq sedekah pada Bidang Adm Pemerintahan Desa	Terwujudnya pelaksanaan gerakan etam mengaji dan pengumpulan zakat	laporan	48
12	Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Pernilaian Berjenjang setiap bulan dan Final Tahunan serta melaksanakan tugas atasan	kepatuhan pembuatan SKP Info	Nilai	65
13	Maturitas SPIP Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Maturisasi SPIP Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100
14	Ketersediaan Laporan Dokumen Manajemen Resiko Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	pemenuhan ketersediaan data Manajemen Resiko	Persen	14,1
15	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik - Layanan Konsultasi Desa	terwujudnya layanan konsultasi administrasi Pemerintahan Desa	Nilai	20

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp.7.885.720.910	APBD
2	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp. 500.000.000	APBD
3	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Rp. 250.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa



POINO, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama
Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Desa



SOPIAN NUR, S.Sos
Penata TK I (III/d)
NIP. 19680825 200012 1 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : ISNAINY AFIDA,SE
Jabatan : Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai Kartanegara.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : POINO, S.IP, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai Kartanegara.
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Kutai Kartanegara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA)Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada Perangkat Daerah yang saya Pimpin;
2. Terwujudnya Pencapaian Indikator Kinerja (IKK) yang mendukung keberhasilan Pelaksanaan Program Strategis guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kinerja Organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik,tindak lanjut pengaduan masyarakat,tidak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat,Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Menyelesaikan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola Pemerintahan yang bersih,transparan,dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya Percepatan Pembangunan secara efektif dan efesien;
7. Terwujudnya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang efektif,responsif,dan terintegritas melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan Data yang terintegrasi,akurat,mutakhir,dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung Perencanaan,Pelaksanaan,Evaluasi dan Pengambilan Kebijakan yang berbasis Data;
9. Terwujudnya ASN yang religius,berakhlak mulia,dan cinbta Al-Quran melalui Penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari Pembentukan Karakter ASN;
10. Tercapainya kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara akurat,transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting;
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melaksanakan koordinasi,monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun,Monitoring dan evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab saya dan stuktur secara berjenjang;

Pihak kedua

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak kedua
Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa



POINO S.IP, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama
Pengelola Kekayaan Desa dan
Administrasi Desa



ISNAINY Afida, SE

Penata

NIP. 19770709 200701 2 020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terfasilitasinya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa yang terseleksi	Desa	24
2.	Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan	Mewujudkan tingkat Kepatuhan atas Penyampaian Laporan SPT Tahunan	persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per tanggal 31 Maret setiap tahunnya	Persen	100
3.	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Pebruari setiap tahun	Persen	100
4.	Tingkat ketepatan waktu input Data realisasi Kegiatan pada Aplikasi E-Pantau dan telah di verifikasi	Terlaksananya Penginputan E-Pantau yang tepat waktu	Persen	100
5.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu data Indonesia	Terpenuhinya Data Perangkat Desa dan Kepala Dusun	persen	80
6.	Maturitas SPIP	Maturitas SPIP	Dokumen	4
7.	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) dan Pengumpulan Zakat,Infaq,Sedekah	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) dan Pengumpulan Zakat,Infaq,Sedekah	Dokumen	13
8.	Tersusunnya Laporan Pembinaan Kepala Desa	Jumlah laporan hasil Pembinaan Kepala Desa	Laporan	15
9.	Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai(SKP) ,Penilaian Berjenjang setiap bulan dan Final Tahunan serta melaksanakan tugas atasan	Terlaksananya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ,Penilaian berjenjang setiap bulan dan Final Tahunan serta melaksanakan tugas atasan	Persen	100
10.	Penyampaian Perjanjian Kinerja,Indikator Kinerja serta Pengukuran Kinerja dari atasan sampai Pelaksana	Terlaksananya Penyusunan Perjanjian Kinerja,Indikator Kinerja serta Pengukuran Kinerja dan apel	Persen	100

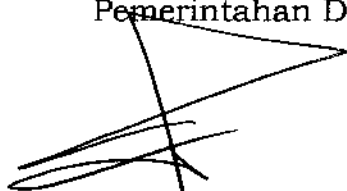
11.	Ketersediaan Laporan Dokumen Manajemen Resiko	Tersusunnya Manajemen Resiko	Persen	100
12.	Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Terlaksananya Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah dengan Srikandi	Persen	100

**KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BIDANG PEMERINTAHAN DESA**

No	Kegiatan / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100.000.000,-	APBD
2.	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	382.500.000,-	APBD

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa



POINO, S.IP, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19690503 199101 1 001

Pengelola Kekayaan Desa dan
Administrasi Desa



ISNAINY AFIDA, SE

Penata

NIP. 19770709 200701 2 020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **AJISSIUS, S.Pd. M.Si**

Jabatan : Pengolah Data

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai
Kartanegara.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **POINO, S.IP, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai
Kartanegara.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua

1. Bersedia melaksanakan supervisi dan Monitoring serta Evaluasi Perjanjian Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan.

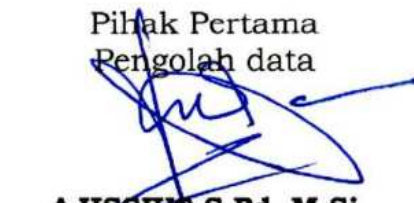
Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa



POINO, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama
Pengolah data



AJISSIUS, S.Pd, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690525 199303 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tata kelola Arsip Perangkat Daerah (Data Korespondensi Dinas pada Aplikasi Srikandi)	Terinfutnya data arsip dalam Srikandi	Data	60
2	Penyampaian LHKPN dan SPT	Terlaksananya Laporan SPT Tahunan	Laporan	1
3	Ketersediaan Laporan Dokumen Manajemen Resiko Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tersedianya Laporan Manajemen Resiko	Laporan	2
4	Tingkat Ketepatan waktu Input Data Realisasi Kegiatan pada Aplikasi E-PANTAU	Terlaksananya penyajian dan pengisian data E-PANTAU	Laporan	12
5	Terlaksananya Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 (Terlaksananya Program dan Kegiatan Bidang Administrasi Pemerintahan Desa)	Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Desa	Dokumen	1
6	Terlaksananya Program dan Kegiatan Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tersedianya data hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Juara Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	2

7	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik - Layanan Konsultasi Desa	Melaksanakan perintah atasan	Data	50
8	Terlaksananya Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 (Terlaksananya Program dan Kegiatan Bidang Administrasi Pemerintahan Desa)	Tersedianya data Laporan Kinerja BPD	Dokumen	1
9	Maturitas SPIP Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tersedianya Laporan SPIP Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	1
10	Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Pernilaian Berjenjang setiap bulan dan Final Tahunan serta melaksanakan tugas atasan	Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian sasaran kinerja pegawai (SKP)	Laporan	1
11	Penyampaian Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Serta Pengukuran Kinerja dari atasan sampai pelaksana	Terlaksananya penyusunan perjanjian kinerja	Dokumen	1

SUB KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2025

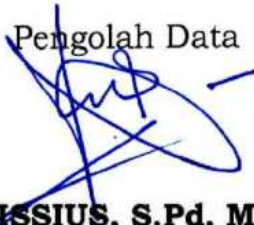
No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Rp. 250.000.000	APBD
2.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp. 400.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa


POINO, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pengolah Data


AJISSIUS, S.Pd, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690525 199303 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **ALVITA KUMARA WASISTIYANA, S.Tr.I.P.**
Jabatan : Penyusun Bahan Kebijakan Pengabdian Masyarakat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **POINO, S.IP., M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai
Kartanegara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
5. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;

6. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
8. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa



POINO, S.IP, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama
Penyusun Bahan Kebijakan
Pengabdian Masyarakat



ALVITA KUMARA WASISTIYANA, S.Tr.I.P.

Penata Muda (III/a)

NIP. 20010720 202409 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tata kelola arsip menggunakan srikandi	Arsip yang terkelola melalui Srikandi	Persen	100
2	Input realisasi kegiatan yang sudah terverifikasi pada E-Pantau	Data kegiatan yang telah terealisasi pada E-Pantau	Persen	100
3	Tersedianya data dan informasi pada bidang pemdes, khususnya berkenaan dengan produk hukum dan aset	Terhimpunnya data produk hukum desa	Dokumen	20
		Tehimpunnya data aset desa	Persen	80
4	Optimalisasi layanan menggunakan aplikasi pendukung	Penggunaan aplikasi SIPADES	Persen	100
		Penggunaan aplikasi SISKEUDES	Persen	100
		Penggunaan aplikasi ATKP Desa	Persen	100
		Penggunaan aplikasi SIPD	Persen	100
5	Terlapornya LHKPN/SPT Tahunan	Terinputnya LHKPN/SPT Tahunan	Dokumen	1
6	Mengikuti kegiatan GEMA dan sedekah	Tersusunnya dokumen kegiatan GEMA	Dokumen	12
		Penyusunan pernyataan infaq/sedekah	Dokumen	1
7	Tersusunnya laporan dokumen manajemen risiko sub kegiatan penyusunan produk hukum desa dan pengelolaan aset desa	Dokumen manajemen risiko sub kegiatan penyusunan produk hukum desa dan fasilitasi pengelolaan aset desa	Dokumen	4
8	Tersusunnya SKP bulanan dan tahunan serta melaksanakan tugas atasan	Tersusunnya SKP	Persen	100
		Tersusunnya penilaian berjenjang bulanan dan final tahunan	Dokumen	13
		Melaksanakan tugas atasan	Persen	100
9	Tersusunnya PK dan IKI, laporan e-kinerja, dan penerapan core value ASN BerAKHLAK	Tersusunnya PK dan IKI	Dokumen	2
		Tersusunnya Laporan E-Kinerja Bulanan dan Tahunan (Final)	Dokumen	13
		Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK	Dokumen	12

10	Tersusunnya progres maturitas pelaksanaan sub kegiatan penyusunan produk hukum desa dan fasilitasi pengelolaan aset desa	Progres dari maturitas sub kegiatan penyusunan produk hukum desa dan fasilitasi pengelolaan aset desa	Dokumen	4
11	Penyusunan capaian pelaksanaan sub kegiatan penyusunan produk hukum desa dan pengelolaan aset desa	Progres pelaksanaan sub kegiatan penyusunan produk hukum desa	Persen	100
		Progres pelaksanaan sub kegiatan pengelolaan aset desa	Persen	100
12	Pelayanan konsultasi desa	Tersusunnya dokumen dari pelayanan terhadap desa yang berkonsultasi	Dokumen	12

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

No	Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Rp100.000.000	APBD
2.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Rp250.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa


POINO, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama
Penyusun Bahan Kebijakan
Pengabdian Masyarakat


ALVITA KUMARA WASISTIYANA, S.Tr.I.P.
Penata Muda (III/a)
NIP. 20010720 202409 2 002

PENGUKURAN KINERJA

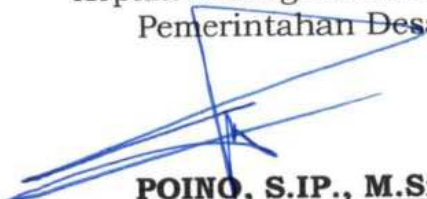
1. PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2. JAFUNG/PELAKSANA : PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT
3. TAHUN : 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
1.	Tata kelola arsip menggunakan srikandi	Arsip yang terkelola melalui Srikandi	100	Persen	100	Persen	100,00 %
2.	Input realisasi kegiatan yang sudah terverifikasi pada E-Pantau	Data kegiatan yang telah terealisasi pada E-Pantau	100	Persen	100	Persen	100,00 %
3	Tersedianya data dan informasi pada bidang pemdes, khususnya berkenaan dengan produk hukum dan aset	Terhimpunnya data produk hukum desa	20	Dokumen	20	Dokumen	100,00 %
		Terhimpunnya data aset desa	80	Persen	80	Persen	80,00 %
4	Optimalisasi layanan menggunakan aplikasi pendukung	Penggunaan aplikasi SIPADES	100	Persen	100	Persen	100,00 %
		Penggunaan aplikasi SISKEUDES	100	Persen	100	Persen	100,00 %
		Penggunaan aplikasi ATKP Desa	100	Persen	100	Persen	100,00 %
		Penggunaan aplikasi SIPD	100	Persen	100	Persen	100,00 %
5	Terlapornya LHKPN/SPT Tahunan	Terinputnya LHKPN/SPT Tahunan	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00 %
6	Mengikuti kegiatan GEMA dan sedekah	Tersusunnya dokumen kegiatan GEMA	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00 %
		Penyusunan pernyataan infaq/sedekah	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00 %
7	Tersusunnya laporan dokumen manajemen risiko sub kegiatan penyusunan produk hukum desa dan pengelolaan aset desa	Dokumen manajemen resiko sub kegiatan penyusunan produk hukum desa dan fasilitasi pengelolaan aset desa	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00 %
8	Tersusunnya SKP bulanan dan tahunan serta melaksanakan tugas atasan	Tersusunnya SKP	100	Persen	100	Persen	100,00 %
		Tersusunnya penilaian berjenjang bulanan dan final tahunan	13	Dokumen	13	Dokumen	100,00 %

		Melaksanakan tugas dari atasan	100	Persen	100	Persen	100,00	%
9	Tersusunnya PK dan IKI, laporan e-kinerja, dan penerapan core value ASN BerAKHLAK	Tersusunnya PK dan IKI	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	%
		Tersusunnya Laporan E-Kinerja Bulanan dan Tahunan (Final)	13	Dokumen	13	Dokumen	100,00	%
		Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	%
10	Tersusunnya progres maturitas pelaksanaan sub kegiatan penyusunan produk hukum desa dan fasilitasi pengelolaan aset desa	Progres dari maturitas sub kegiatan penyusunan produk hukum desa dan fasilitasi pengelolaan aset desa	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	%
11	Penyusunan capaian pelaksanaan sub kegiatan penyusunan produk hukum desa dan pengelolaan aset desa	Progres pelaksanaan sub kegiatan penyusunan produk hukum desa	100	Persen	100	Persen	100,00	%
		Progres pelaksanaan sub kegiatan pengelolaan aset desa	100	Persen	100	Persen	100,00	%
12	Pelayanan konsultasi desa	Tersusunnya dokumen dari pelayanan terhadap desa yang berkonsultasi	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	%

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

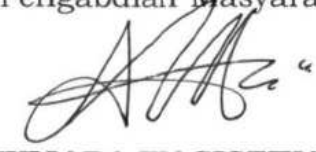
Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa



POINO, S.I.P., M.Si.

Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Penyusun Bahan Kebijakan
Pengabdian Masyarakat



ALVITA KUMARA WASISTIYANA, S.Tr.I.P.

Penata Muda (III/a)
NIP. 20010720 202409 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **ROYAN HANDANA, S.Sos**
Jabatan : Analis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **JULPIANSYAH, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai Kartanegara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK";
4. Melaksanakan pengelolaan barang dan jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
5. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan;
6. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;
7. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;
9. Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
10. Melaksanakan Manajemen Risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
11. Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
12. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
13. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
14. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
15. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
16. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
17. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
19. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan
Aset Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa


JULPIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19740901 200701 1 015

Pihak Pertama
Analisis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi


ROYAN HANDANA, S.Sos
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19800915 200902 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Menyampaikan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur negara (LHKPN) dan Pajak tahunan (SPT)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahun 2025 pada aplikasi DJP Online	Laporan	1
2.	Menyampaikan dan melaporkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap bulan dan final	Laporan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bulanan dan Final Tahun 2025	Laporan	13
3.	Menyusun Laporan Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Kertas Kerja Manajemen Resiko pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	12
4.	Melaksanakan perintah atasan dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah (Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Melaksanakan perintah atasan diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Kegiatan	12
5.	Melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan penyerapan anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan serta Melaksanakan pelaporan P3DN	Menyusun Kertas Kerja Anggaran Kas Tahun Anggaran 2025	Laporan	2
6.	Melaksanakan Gerakan Etam Mengaji (GEMA) dan pengumpulan Zakat, Infak dan Shodakoh melalui UPZ	Melaksakan Gerakan Etam Mengaji (GEMA) dan pengumpulan Zakat	Kegiatan	12
7.	Menyusun dokumen kebijakan dan input data informasi serta laporan perangkat daerah (Perjanjian Kinerja, SAKIP, Srikandi, E-Pantau, Penilaian Berjenjang, Surat Pertanggung jawaban kegiatan, Billing Pajak, Coretax dan lain-lain)	Input Data Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD pada aplikasi Epantau	Laporan	12
8.	Menyusun dokumen kebijakan dan input data informasi serta laporan perangkat daerah (Perjanjian Kinerja, SAKIP, Srikandi, E-Pantau, Penilaian Berjenjang, Surat Pertanggung jawaban kegiatan, Billing Pajak, Coretax dan lain-lain)	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Surat Menyurat pada aplikasi Srikandi)	Surat	30

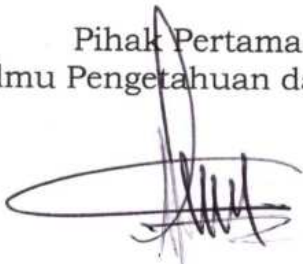
9.	Menyusun dokumen kebijakan dan input data informasi serta laporan perangkat daerah (Perjanjian Kinerja, SAKIP, Srikandi, E-Pantau, Penilaian Berjenjang, Surat Pertanggung jawaban kegiatan, Billing Pajak, Coretax dan lain-lain)	Tersusunnya perjanjian Kinerja Tahun 2025	Laporan	2
10.	Menyusun dokumen kebijakan dan input data informasi serta laporan perangkat daerah (Perjanjian Kinerja, SAKIP, Srikandi, E-Pantau, Penilaian Berjenjang, Surat Pertanggung jawaban kegiatan, Billing Pajak, Coretax dan lain-lain)	Surat Pertanggung jawaban Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	36

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan
Aset Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa


JULPIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19740901 200701 1 015

Pihak Pertama
Analisis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi


ROYAN HANDANA, S.Sos
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19800915 200902 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rinanur Oktavia,SE**

Jabatan : **Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Julpiansyah,S.Sos,M.Si**

Jabatan : **Kepala Sub.Bagian Keuangan dan Aset**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan pengelolaan barang dan jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
4. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan;
5. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;
6. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
7. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;

8. Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
9. Melaksanakan Manajemen Risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
10. Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
11. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
12. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
13. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
14. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
15. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
16. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
17. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.
19. Melaksanakan Gerakan Etam Mengaji (GEMA) dan Pengumpulan Zakat, Infak dan Shodakoh melalui UPZ

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Keuangan dan
Aset,**


Julpiansyah, S.Sos, M.Si
Pembina / IV/a
NIP.19740901 200701 1 015

Pihak Pertama,
**Penyusun Program Anggaran dan
Pelaporan**

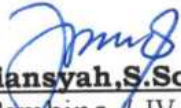

Rinanur Oktavia, SE
Penata Tk I / III/d
NIP. 19840420 201001 2 037

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Penyampaian Laporan Keuangan SKPD	Tersampainya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran / SKPD	Laporan	12
2.	Melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Penyerapan Anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan serta melaksanakan pelaporan P3DN	Terlaksananya Laporan P3DN Kegiatan	Laporan	12
3.	Menyampaikan dan melaporkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap bulan dan final	Terlaporkannya SKP setiap bulan dan final	Laporan	12
4.	Melaksanakan Gerakan Etam Mengaji (GEMA) dan pengumpulan Zakat,Infaq dan shadakah melalui UPZ	Terlaksananya GEMA	Kegiatan	24
5.	Menyusun Laporan Manajemen Resiko Peringkat Daerah	Tersusunnya Laporan Manajemen Resiko Sub Kegiatan	Laporan	3
6.	Menyampaikan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKPN) dan Pajak tahunan (SPT)	Tersampainya Laporan Pajak Tahunan (SPT)	Dokumen	1
7.	Melaksanakan perintah atasan dalam rangka meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah (Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah)	Tercapainya Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan	25

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset,


Julpiansyah, S.Sos, M.Si
 Pembina / IV/a
 NIP.19740901 200701 1 015

Pihak Pertama,
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan


Rinanur Oktavia, SE
 Penata Tk. I / III / d
 NIP.19840420 201001 2 037



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DYAH RISNAWATI, S.E
Jabatan : Pengolah Daftar Gaji

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : JULPIANSYAH, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan Target pada Perjanjian kinerja dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 pada Perangkat Daerah;
2. Menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan melaporkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;
4. Melaksanakan pengelolaan barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan adil tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan tata kelola arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan ketersediaan data dan informasi pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat Inovasi dan atau dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi Perangkat Daerah;
9. Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di Perangkat Daerah;
12. Melaksanakan Review awal terhadap indicator kinerja utama Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini;

13. Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP Tahunan;
15. Tercapainya Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan;
16. Pemenuhan target pendapatan daerah;
17. Melaksanakan monitor Centre for Prevention KPK;
18. Melaksanakan koordinasi konvergensi penurunan stunting di kabupaten;
19. Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah;
20. Melakukan koordinasi, monitoring dan Evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja kepada atasan langsung;
21. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pihak Pertama,
Pengolah Daftar Gaji


JULPIANSYAH, S.Sos., M.Si

Pembina, (IV/a)
NIP. 197409012007011015


DYAH RISNAWATI, S.E

Penata (III/c)
NIP. 197812162012122003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN/URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaporkannya SKP Setiap Bulan Pada Aplikasi E Kinerja	Jumlah Laporan SKP	Laporan	12
2.	Terlaksananya GEMA dan Pengumpulan Zakat, Infak dan Shodaqoh melalui UPZ	Jumlah Kegiatan GEMA, Pengumpulan Zakat, Infak dan Shodaqoh	Kegiatan	24
3.	Terlaporkannya Pajak SPT Tahunan	Jumlah Laporan SPT Tahunan	Laporan	1
4.	Melaksanakan Tugas Kedinasan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	Kegiatan	30
5.	Tersusunnya Laporan Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Laporan	4
6.	Tersusunnya Daftar Gaji, Daftar rapel Gaji dan kelengkapannya	Jumlah Daftar Gaji, Rapel Gaji dan kelengkapannya	Daftar	26
7.	Tersusunnya Daftar Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP)	Jumlah Daftar TPP dan kelengkapannya	Daftar	14
8.	Tersusunnya Data Template Gaji dan tunjangan untuk Aplikasi SIPD RI	Jumlah Template Gaji dan Tunjangan	Data	12
9.	Terinputnya Data Gaji dan Tunjangan di Aplikasi E Pantau	Jumlah Data Gaji dan Tunjangan	Data	24
10.	Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan	Jumlah PK Pelaksana dan SPJ Kegiatan	Dokumen	12
11.	Terinputnya dan Terlaporkannya BUPOT PPh Pasal 21 dan Pelaporan PPh Pasal 21 di Aplikasi Cortax	Jumlah BUPOT dan PPh Pasal 21	Laporan	12
12.	Terlaksananya Rekonsiliasi Gaji dan Tunjangan	Jumlah Rekonsiliasi Gaji dan Tunjangan	Kegiatan	2

NO.	SASARAN/URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
13.	Terinputnya perubahan data Gaji,Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) di Aplikasi SIMGAJI	Jumlah Perubahan data Gaji,Kenaikan Pangkat dan KGB	Data	75
14.	Tersusunnya Data BPJS di Aplikasi ARIP	Jumlah Data BPJS di Aplikasi ARIP	Data	12

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Keuangan dan
Aset


JULPIANSYAH, S.Sos.,M.Si
Pembina, (IV/a)
NIP. 197409012007011015

Pihak Pertama,
Pengolah Daftar Gaji


DYAH RISNAWATI, S.E
Penata (III/c)
NIP. 197812162012122003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI BUDIARTI,SE.**
Jabatan : **PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **KARTIKA SARI, A.Ma.Pd**
Jabatan : **KEPALA SUBBAG UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN**
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
2. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
3. Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA SUBBAG UMUM,
KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN


KARTIKA SARL A. Ma. Pd
PENATA TK. I (III/d)
NIP.197205191993062001

PIHAK PERTAMA,
PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN
DAN PELAPORAN DINAS


SRI BUDIARTL. SE
PENATA TK. I (III/d)
NIP. 198205222001122002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Melaksanakan Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
2	Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN/P3K/Non ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas berdasarkan tugas dan fungsi	orang	151
3	Melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselesaikan	Laporan	12
4	Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terlaksana	laporan	12
5	Membuat Kertas Kerja Manajemen Resiko Sub Kegiatan per triwulan	Jumlah Kertas Kerja Manajemen Resiko yang terselesaikan	Kerta Kerja	12
6	Membuat SKP Bulanan dan tahunan	Jumlah SKP	Laporan	13
7	Membuat Perjanjian Kinerja Tahunan	Jumlah Dokumen Kinerja	Dokumen	1

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA SUBBAG UMUM,
KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN


KARTIKA SARI A.Ma.Pd
PENATA TK. I (III/d)
NIP.197205191993062001

PIHAK PERTAMA,
PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN
DAN PELAPORAN DINAS


SRI BUDIARTI L. S.
PENATA TK. I (III/d)
NIP. 198205222001122002

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PERUBAHAN
PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN DINAS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

1. Tugas Utama : Melakukan kegiatan penyusunan dan penelaahan data obyek kerja di bidang program anggaran dan Pelaporan.
2. Fungsi :
 - a. Menerima dan memeriksa bahan dan data perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja ;
 - c. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan perencanaan, penganggaran dan pelaporan ;
 - d. Menyusun konsep perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja ;
 - e. Mendiskusikan konsep perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan rencana program dan anggaran ;
 - g. Mengevaluasi proses penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran;
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan

3. Indikator Kinerja Individu

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	Σ Jumlah Laporan	Kegiatan GEMA
2	Jumlah ASN/P3K/Non ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	Σ Jumlah Orang	RKA/DPA
3	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselesaikan	Laporan	Σ Jumlah Laporan	RKA/DPA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leni Waty, S.Sos

Jabatan : Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris / Pelaksana Sub Bagian Umum
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Kartika Sari, A.Ma.Pd

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik";
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;

8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting;
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

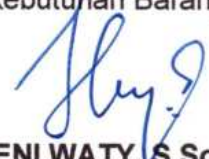
Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian


KARTIKA SARI, A. Ma. Pd

Penata Tingkat I
NIP. 19720519 199306 2 001

Pihak Pertama,
Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris


LENI WATY, S.Sos

Penata Muda Tingkat I
NIP. 19760404 200701 2 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

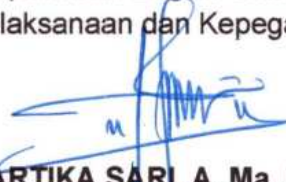
NO	SASARAN/URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersusunnya Daftar RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan APBD dan APBD-P pada Perangkat Daerah	Jumlah Daftar RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan yang tersusun	Daftar	4
2	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Barang yang disediakan	Unit	5
3	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan yang tersusun	Laporan	1
4	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	65
5	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1
6	Tersusunnya Dokumen Administrasi Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah dokumen kelengkapan adm penggunaan anggaran yang tersusun	Dokumen	500
7	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun	Laporan	48
8	Terinputnya data pelaksanaan sub kegiatan pada Aplikasi E-Pantau	Jumlah data pelaksanaan sub kegiatan yang terinput pada aplikasi E-Pantau	Data	48
9	Tersusunnya naskah dinas melalui Aplikasi Srikandi	Jumlah Naskah Dinas yang tersusun melalui Aplikasi Srikandi	Naskah	96

NO	SASARAN/URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Tersusunnya Dokumen Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap bulan dan Tahunan (Final)	Jumlah Dokumen Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap bulan dan Tahunan (Final) yang tersusun	Dokumen	13
11	Tersusunnya Laporan Akhir Pelaksanaan (Laporan Akhir) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan (Laporan Akhir) yang tersusun	Laporan	4
12	Tersusunnya Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu dan Pengukuran APBD dan APBDP Tahun Anggaran 2025	Jumlah Dokumen yang tersusun	Dokumen	6

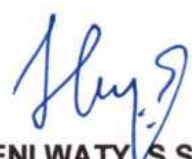
**KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUAPETN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	APBD
2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	APBD
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	APBD
4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	597.256.900	APBD
	Jumlah	747.256.900	

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian


KARTIKA SARI, A. Ma. Pd
Penata Tingkat I
NIP. 19720519 199306 2 001

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025
Pihak Pertama,
Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris


LENI WATY S.Sos
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19760404 200701 2 017



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ike Noralita , S.Pd.,M.Si

Jabatan : Pengelola Data / Pelaksana Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KARTIKA SARI, A.Ma.Pd

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

1. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
2. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
3. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
4. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN
6. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
7. Berkomitmen melaksanakan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.ningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan

mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;

9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.
11. Terkelolanya Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD;
12. Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;

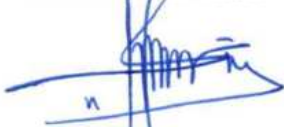
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui tim penyusun, monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum dan
Ketatalaksanaan



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
Penata Tingkat I
NIP. 197205191993062001

Pihak Pertama,
Pengelola Data



IKE NORALITA, S.SPd.,MSi
Penata Tingkat I
NIP. 1983070902 200902 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN/URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak	Jumlah Penyampaian Laporan SKM dan Laporan Rencana Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor, PPID, Pengelolaan platform website DPMD dan	laporan	5
2	Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
3	Melaksanakan an Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen laporan kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Dokumen	4
4	Melaksanakan an Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Dokumen	4
5	Tersusunnya laporan akhir pelaksanaan 2 Sub Kegiatan	Jumlah laporan akhir yang tersusun	laporan	2
6	Tersusunnya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Jumlah dokumen SKP Bulanan dan final (Tahunan) yang tersusun	dokumen	13
7	Menyusun Perjanjian Kinerja, IKI	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	1
8	Tersusunnya dokumen KAK dan RKA sub kegiatan	Jumlah dokumen KAK dan RKA yang tersusun	dokumen	4
9	Terinputnya data pelaksanaan kegiatan pada aplikasi e-pantau	Jumlah data pelaksanaan kegiatan yang terinput pada aplikasi e-pantau	data	24
10	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko Subbagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian per Triwulan, SP4N LAPOR	Jumlah Laporan Manajemen Risiko	Laporan	4

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum dan
Ketatalaksanaan



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
Penata Tingkat I
NIP. 197205191993062001

Pihak Pertama,
Pengelola Data



IKE NORALITA, S.SPd.,MSi
Penata Tingkat I
NIP. 1983070902 200902 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yeni Kaniawati, SE

Jabatan : Pengadministrasi Umum / Pelaksana Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Kartika Sari, A.Ma.Pd

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik";
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;

8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting;
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

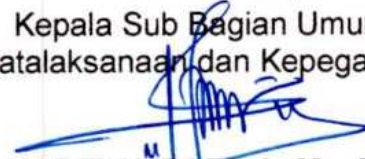
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian


KARTIKA SARI, A. Ma. Pd
Penata Tingkat I
NIP. 19720519 199306 2 001

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Umum


YENI KANIAWATI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19760319 199603 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN/URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	1
2	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	1
3	Tersusunnya dokumen administrasi penyediaan bahan logistik kantor dan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen kelengkapan administrasi realisasi anggaran dan pembukuan yang tersusun	dokumen	400
4	Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun	laporan	24
5	Terinputnya data pelaksanaan sub kegiatan pada aplikasi E-Pantau	Jumlah data pelaksanaan sub kegiatan yang terinput pada aplikasi E-Pantau	Data	24
6	Tersusunnya naskah dinas melalui Aplikasi Srikandi	Jumlah naskah dinas yang tersusun melalui aplikasi srikandi	naskah	48
7	Tersusunnya Dokumen Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Setiap Bulan dan Tahunan (Final)	Jumlah Dokumen Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Setiap Bulan dan Tahunan (Final) yang tersusun	Dokumen	13
8	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan (Laporan Akhir) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan (Laporan Akhir) yang tersusun	Laporan	2
9	Tersusunnya Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu dan Pengukuran APBD dan APBDP Tahun Anggaran 2025	Jumlah Dokumen Yang tersusun	Dokumen	6

**KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUAPETN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN *	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	820.694.300	APBD
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.000.000	APBD
Jumlah Anggaran		844.694.300	

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian


KARTIKA SARI, A. Ma. Pd

Penata Tingkat I
NIP. 19720519 199306 2 001

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Umum


YENI KANIAWATI, SE

Penata Tingkat I
NIP. 19760319 199603 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Bustaniah, S.Sos

Jabatan : Pengadministrasi Umum / Pelaksana Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Kartika Sari, A.MA.Pd

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

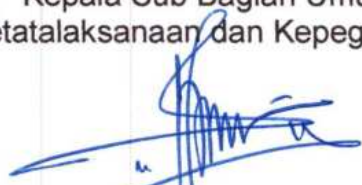
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui tim penyusun, monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
Penata Tingkat I
NIP. 19720519 199306 2 001

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Umum



Hj. BUSTANIAH, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690127 200502 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

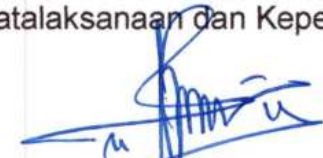
NO	SASARAN/URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	200
2	Tersusunnya laporan akhir sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang tersusun	Laporan	1
3	Terinputnya data pelaksanaan sub kegiatan pada aplikasi E-Pantau	Jumlah data pelaksanaan sub kegiatan yang terinput pada aplikasi E-Pantau	Data	12
4	Tersusunnya Perjanjian Kinerja ASN	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja yang tersusun dan tersampaikan	Dokumen	6
5	Tersusunnya Dokumen Perjanjian Berjenjang	Jumlah Dokumen Penilaian Berjenjang yang tersusun	Dokumen	13
6	Tersusunnya naskah Dinas terkait sub kegiatan	Jumlah naskah Dinas terinput pada aplikasi Srikandi	Naskah	25
7	Tersusunnya laporan Kinerja dan Keuangan sub kegiatan	Jumlah laporan Kinerja dan Keuangan yang tersusun	Laporan	12
8	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Jumlah dokumentasi pelaksanaan Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Dokumentasi	12

**KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN*	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		100.000.000,-	

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
Penata Tingkat I
NIP. 19720519 199306 2 001

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Umum



Hj. BUSTANIAH, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690127 200502 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **AJI NAZARUDIN, S.Sos**
Jabatan : Analis Pengembangan SDM Aparatur
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **H. POINO, S.IP., M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai
Kartanegara.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;

7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Kepala Bidang
Administrasi Pemerintahan Desa

Analisis Pengembangan SDM Aparatur



POINO, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001



AJI NAZARUDIN, S.Sos
Penata III/c
NIP. 19790114 1999031 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD melalui peningkatan Kapasitas	Kegiatan	2
2.	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas SPT Tahunan	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per tanggal 31 Maret setiap tahunnya	Persen	100
3.	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan setiap tahun	Persen	100
4.	Terlaksananya Kepatuhan Input E-Pantau	Tingkat ketepatan waktu Input E-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
5.	Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Terlaksananya Tata Kelola Arsip pada Aplikasi Srikandi	Persen	100
6.	Penerapan Core Values ASN "BerAKHLAK"	Internalisasi Core Values ASN "BerAKHLAK"	Persen	100
7.	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
8.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
9.	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah per triwulan	Persen	100
10.	Tersedianya data Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Ketersediaan Data BPD, Laporan Kinerja BPD dan Produk Hukum Desa	Persen	80
11.	Manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Penggunaan Aplikasi SIPD dalam Penatausahaan Keuangan	Persen	100
12.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" dan pengumpulan Zakat, Infaq sedekah pada Bidang Adm Pemerintahan Desa	Terlaksananya GEMA dan kewajiban Zakat/Infaq	Laporan	12
13.	Terlaksananya perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi bidang pemerintahan desa	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah satu Data	Persen	100

		Kukar melalui Aplikasi Srikandi		
14.	Terwujudnya Rumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi Bidang Pemerintahan Desa	Melaksanakan Tugas Atasan	Persen	100

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp. 300.000.000,-	APBD
2.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp. 200.000.000,-	APBD

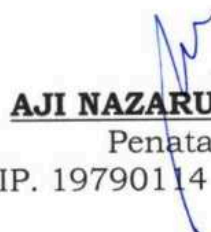
Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Kepala Bidang
Admoinistrasi Pemerintahan Desa



POINO, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Analisis Pengembangan SDM Aparatur



AJI NAZARUDIN, S.Sos
Penata III/c
NIP. 19790114 1999031 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ERNANI, S. Sos**

Jabatan : **ANALIS KELEMBAGAAN MASYARAKAT**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ASMI RIYANDI ELVANDAR, S. Sos. M. Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA.**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna

mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

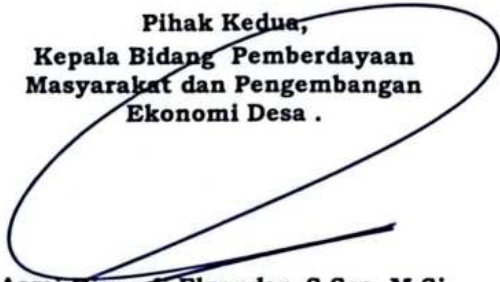
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa .


Asmi Riyandi Elvandar, S.Sos, M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 1984011 201001 1 002

Pihak Pertama,
Analisis Kelembagaan Masyarakat


ERNANI, S. Sos.
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19830611 200902 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tingkat Kepatuhan terinputnya Data pada Aplikasi E Pantau (untuk sub. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat) dan Korespondensi Surat Menyurat bersifat Kedinasan pada Aplikasi SRIKANDI.	Jumlah Data Kegiatan / Sub kegiatan yang terinput pada aplikasi E-Pantau dan Jumlah Surat Dinas Pada bidang	Aplikasi	Laporan/ Data/ Dokumen
2.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak diBidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak diBidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Kegiatan/ Data/ Laporan/ Dokumen	12 Bulan
3.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa .	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
4.	Tingkat Kepatuhan Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Khususnya Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa.	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
5.	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Manajemen Resiko Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa dan Sub. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Tahun 2025	Tersusunnya dokumen Manajemen Risiko pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Dokumen	Per Semester

6.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Koordinasi perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data informasi, melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta penilaian secara berjenjang.	Jumlah Koordinasi perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data informasi, melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta penilaian secara berjenjang.	Kegiatan/ Data/ Laporan/ Dokumen	12 Bulan
7.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
8.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Kegiatan Prevalensi Stunting sesuai dengan Program dan Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Prevalensi Stunting	Persen	14,1
9.	Tingkat Kepatuhan terwujudnya Peningkatan Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
10.	Tingkat Kepatuhan terlaksana dan terwujudnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
11.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa**

Asmi Riyandi Elvandar, S.Sos, M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 1984011 201001 1 002

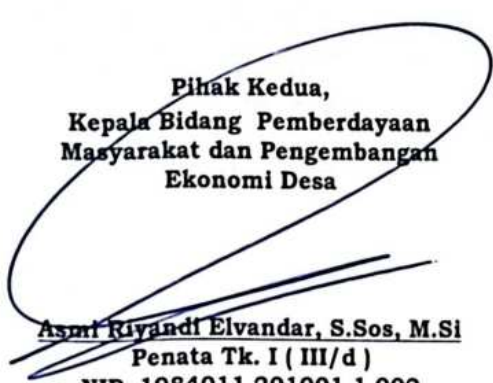
**Pihak Pertama,
Analis Kelembagaan Masyarakat**

ERNANI, S. Sos.
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19830611 200902 2 003

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Rp. 150.000.000	APBD

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa


Asmi Riyandi Elvandar, S.Sos, M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 1984011 201001 1 002

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama,
Analisis Kelembagaan Masyarakat


ERNANI, S. Sos.
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19830611 200902 2 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOHAMMAD ADRIANNUR**

Jabatan : **PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ASMI RIYANDI ELVANDAR, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Pengembangan Ekonomi Desa

ASMI RIVANDI ELVANDAR, S.Sos,M.Si

Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840111 2010 1 002

Pihak Pertama,
Pengelola Monitoring dan Evaluasi

MOHAMMAD ADRIANNUR

Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 19671007 199603 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tingkat kepatuhan terinfutnya data pada aplikasi E-Pantau (untuk Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan korespondensi surat menyurat bersifat kedinasan pada aplikasi Srikandi	Jumlah data kegiatan/sub kegiatan yang terinfut pada Aplikasi E-Pantau dan jumlah surat dinas pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Aplikasi	Laporan dan Dokumen
2.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12 Laporan
3.	Tingkat Kepatuhan terlaksana dan terwujudnya partisipasi perangkat daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
4.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya penyelenggaraan satu data Indonesia pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Persentase keterinfutan data pada satu data Indonesia	Persen	100

5.	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Manajemen Resiko Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa dan Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna tahun 2025	Tersusunnya Dokumen Manajemen Resiko pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Dokumen	Triwulan
6.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Level	3
7.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan/Data/ Laporan/Dokumen	12 Bulan

8.	Tingkat Kepatuhan terwujudnya Peningkatan Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
9.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Koordinasi perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data informasi, melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta penilaian secara berjenjang	Jumlah Koordinasi Perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data, informasi, melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta penilaian secara berjenjang	Kegiatan/data/Laporan /Dokumen	12 Bulan
10.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Kegiatan Prevalensi Stunting sesuai dengan Program dan Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Prevalensi Stunting	Persen	14,1
11.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Persentase Pelaksanaan Pelaporan dan Tindak lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100

Kutai Kartanegara

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Pengembangan Ekonomi Desa

ASMI RIYANDI ELVANDAR, S.Sos., M.Si

Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840111 2010 1 002

Pihak Pertama,
Pengelola Monitoring dan Evaluasi

MOHAMMAD ADRIANNUR

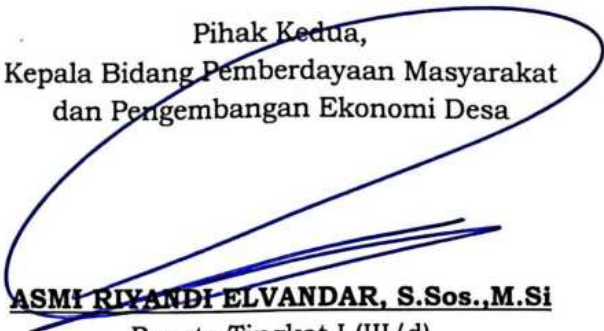
Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 19671007 199603 1 004

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Kegiatan	Anggaran	KETERANGAN
1.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp. 643.360.500,-	APBD

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Pengembangan Ekonomi Desa


ASMI RIYANDI ELVANDAR, S.Sos., M.Si

Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840111 2010 1 002

Pihak Pertama,
Pengelola Monitoring dan Evaluasi


MOHAMMAD ADRIANNUR

Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 19671007 199603 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **SOPIAN NUR, S.Sos**
Jabatan : Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai
Kartanegara.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **POINO, S.IP, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai
Kartanegara.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa



POINO, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama
Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Desa



SOPIAN NUR, S.Sos
Penata TK I (III/d)
NIP. 19680825 200012 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Penggunaan Srikandi	Persen	100
2	Penyampaian LHKPN dan SPT tahunan	Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT 100% paling lambat akhir bulan februari setiap tahun	Persen	100
3	Terlaksannya Dokuemn Pedoman APBDesa	Tersedianya pedoman Apbdesa bagu Desa	Desa	193
4	Ketersediaan Laporan Dokumen Manajemen Resiko bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Pemenuhan ketersediaan data e -pantau	Persen	100
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
6	Menurunnya Prevalensi Stunting - Terlaksananya Program Aparatur Bahagia	Terwujudnya aparatur desa yang berbahagia dengan BPJS Kesehatan	Persen	14,1
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia - Tersedianya data Bidang Administrasi Pemerintahan	Kersedianya data peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagan Kerjaan	Persen	100
8	novasi Perangkat Daerah dan Indeks Inovasi Daerah	Terlaksananya Penggunaan Aplikasi SIPD	Persen	100
9	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia - Tersedianya data Bidang Administrasi Pemerintahan	tersediannya data keuangan Desa	Lapora n	48
10	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia - Tersedianya data Bidang Administrasi	Tersedianya data penegasan dan penetapan batas desa	Lapora n	10

	Pemerintahan			
11	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" dan pengumpulan Zakat, Infaq sedekah pada Bidang Adm Pemerintahan Desa	Terwujudnya pelaksanaan gerakan etam mengaji dan pengumpulan zakat	laporan	48
12	Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Pernilaian Berjenjang setiap bulan dan Final Tahunan serta melaksanakan tugas atasan	kepatuhan pembuatan SKP Info	Nilai	65
13	Maturitas SPIP Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Maturisasi SPIP Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100
14	Ketersediaan Laporan Dokumen Manajemen Resiko Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	pemenuhan ketersediaan data Manajemen Resiko	Persen	14,1
15	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik - Layanan Konsultasi Desa	terwujudnya layanan konsultasi administrasi Pemerintahan Desa	Nilai	20

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp.7.885.720.910	APBD
2	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp. 500.000.000	APBD
3	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Rp. 250.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa



POINO, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama
Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Desa



SOPIAN NUR, S.Sos
Penata TK I (III/d)
NIP. 19680825 200012 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **ISNAINY AFIDA,SE**
Jabatan : Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai
Kartanegara.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **POINO, S.IP, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai
Kartanegara.
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Kutai Kartanegara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA)Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada Perangkat Daerah yang saya Pimpin;
2. Terwujudnya Pencapaian Indikator Kinerja (IKK) yang mendukung keberhasilan Pelaksanaan Program Strategis guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kinerja Organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik,tindak lanjut pengaduan masyarakat,tidak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat,Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Menyelesaikan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola Pemerintahan yang bersih,transparan,dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya Percepatan Pembangunan secara efektif dan efesien;
7. Terwujudnya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang efektif,responsif,dan terintegritas melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan Data yang terintegrasi,akurat,mutakhir,dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung Perencanaan,Pelaksanaan,Evaluasi dan Pengambilan Kebijakan yang berbasis Data;
9. Terwujudnya ASN yang religius,berakhlak mulia,dan cinbta Al-Quran melalui Penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari Pembentukan Karakter ASN;
10. Tercapainya kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara akurat,transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting;
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melaksanakan koordinasi,monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun,Monitoring dan evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab saya dan stuktur secara berjenjang;

Pihak kedua

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak kedua
Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa



POINO S.IP, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama
Pengelola Kekayaan Desa dan
Administrasi Desa



ISNAINY Afida, SE

Penata

NIP. 19770709 200701 2 020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terfasilitasinya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa yang terseleksi	Desa	24
2.	Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan	Mewujudkan tingkat Kepatuhan atas Penyampaian Laporan SPT Tahunan	persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per tanggal 31 Maret setiap tahunnya	Persen	100
3.	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Pebruari setiap tahun	Persen	100
4.	Tingkat ketepatan waktu input Data realisasi Kegiatan pada Aplikasi E-Pantau dan telah di verifikasi	Terlaksananya Penginputan E-Pantau yang tepat waktu	Persen	100
5.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu data Indonesia	Terpenuhinya Data Perangkat Desa dan Kepala Dusun	persen	80
6.	Maturitas SPIP	Maturitas SPIP	Dokumen	4
7.	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) dan Pengumpulan Zakat,Infaq,Sedekah	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) dan Pengumpulan Zakat,Infaq,Sedekah	Dokumen	13
8.	Tersusunnya Laporan Pembinaan Kepala Desa	Jumlah laporan hasil Pembinaan Kepala Desa	Laporan	15
9.	Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai(SKP) ,Penilaian Berjenjang setiap bulan dan Final Tahunan serta melaksanakan tugas atasan	Terlaksananya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ,Penilaian berjenjang setiap bulan dan Final Tahunan serta melaksanakan tugas atasan	Persen	100
10.	Penyampaian Perjanjian Kinerja,Indikator Kinerja serta Pengukuran Kinerja dari atasan sampai Pelaksana	Terlaksananya Penyusunan Perjanjian Kinerja,Indikator Kinerja serta Pengukuran Kinerja dan apel	Persen	100

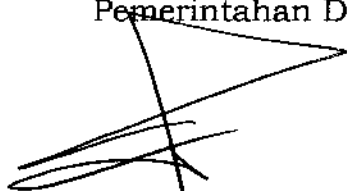
11.	Ketersediaan Laporan Dokumen Manajemen Resiko	Tersusunnya Manajemen Resiko	Persen	100
12.	Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Terlaksananya Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah dengan Srikandi	Persen	100

**KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BIDANG PEMERINTAHAN DESA**

No	Kegiatan / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100.000.000,-	APBD
2.	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	382.500.000,-	APBD

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa



POINO, S.IP, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19690503 199101 1 001

Pengelola Kekayaan Desa dan
Administrasi Desa



ISNAINY AFIDA, SE

Penata

NIP. 19770709 200701 2 020



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **AJISSIUS, S.Pd. M.Si**

Jabatan : Pengolah Data

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai
Kartanegara.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **POINO, S.IP, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai
Kartanegara.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua

1. Bersedia melaksanakan supervisi dan Monitoring serta Evaluasi Perjanjian Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan.

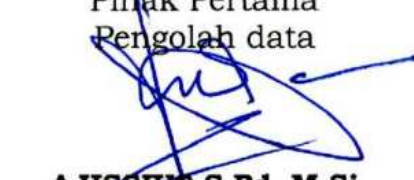
Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa



POINO, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama
Pengolah data



AJISSIUS, S.Pd, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690525 199303 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tata kelola Arsip Perangkat Daerah (Data Korespondensi Dinas pada Aplikasi Srikandi)	Terinfutnya data arsip dalam Srikandi	Data	60
2	Penyampaian LHKPN dan SPT	Terlaksananya Laporan SPT Tahunan	Laporan	1
3	Ketersediaan Laporan Dokumen Manajemen Resiko Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tersedianya Laporan Manajemen Resiko	Laporan	2
4	Tingkat Ketepatan waktu Input Data Realisasi Kegiatan pada Aplikasi E-PANTAU	Terlaksananya penyajian dan pengisian data E-PANTAU	Laporan	12
5	Terlaksananya Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 (Terlaksananya Program dan Kegiatan Bidang Administrasi Pemerintahan Desa)	Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Desa	Dokumen	1
6	Terlaksananya Program dan Kegiatan Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tersedianya data hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Juara Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	2

7	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik - Layanan Konsultasi Desa	Melaksanakan perintah atasan	Data	50
8	Terlaksananya Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 (Terlaksananya Program dan Kegiatan Bidang Administrasi Pemerintahan Desa)	Tersedianya data Laporan Kinerja BPD	Dokumen	1
9	Maturitas SPIP Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tersedianya Laporan SPIP Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	1
10	Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Pernilaian Berjenjang setiap bulan dan Final Tahunan serta melaksanakan tugas atasan	Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian sasaran kinerja pegawai (SKP)	Laporan	1
11	Penyampaian Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Serta Pengukuran Kinerja dari atasan sampai pelaksana	Terlaksananya penyusunan perjanjian kinerja	Dokumen	1

SUB KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2025

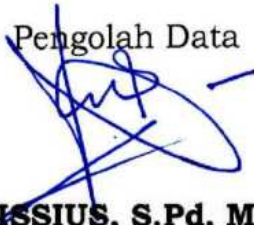
No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Rp. 250.000.000	APBD
2.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp. 400.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa


POINO, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pengolah Data


AJISSIUS, S.Pd, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690525 199303 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **ALVITA KUMARA WASISTIYANA, S.Tr.I.P.**
Jabatan : Penyusun Bahan Kebijakan Pengabdian Masyarakat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **POINO, S.IP., M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai
Kartanegara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
5. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;

6. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
8. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa



POINO, S.IP, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama
Penyusun Bahan Kebijakan
Pengabdian Masyarakat



ALVITA KUMARA WASISTIYANA, S.Tr.I.P.

Penata Muda (III/a)

NIP. 20010720 202409 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tata kelola arsip menggunakan srikandi	Arsip yang terkelola melalui Srikandi	Persen	100
2	Input realisasi kegiatan yang sudah terverifikasi pada E-Pantau	Data kegiatan yang telah terealisasi pada E-Pantau	Persen	100
3	Tersedianya data dan informasi pada bidang pemdes, khususnya berkenaan dengan produk hukum dan aset	Terhimpunnya data produk hukum desa	Dokumen	20
		Tehimpunnya data aset desa	Persen	80
4	Optimalisasi layanan menggunakan aplikasi pendukung	Penggunaan aplikasi SIPADES	Persen	100
		Penggunaan aplikasi SISKEUDES	Persen	100
		Penggunaan aplikasi ATKP Desa	Persen	100
		Penggunaan aplikasi SIPD	Persen	100
5	Terlapornya LHKPN/SPT Tahunan	Terinputnya LHKPN/SPT Tahunan	Dokumen	1
6	Mengikuti kegiatan GEMA dan sedekah	Tersusunnya dokumen kegiatan GEMA	Dokumen	12
		Penyusunan pernyataan infaq/sedekah	Dokumen	1
7	Tersusunnya laporan dokumen manajemen risiko sub kegiatan penyusunan produk hukum desa dan pengelolaan aset desa	Dokumen manajemen risiko sub kegiatan penyusunan produk hukum desa dan fasilitasi pengelolaan aset desa	Dokumen	4
8	Tersusunnya SKP bulanan dan tahunan serta melaksanakan tugas atasan	Tersusunnya SKP	Persen	100
		Tersusunnya penilaian berjenjang bulanan dan final tahunan	Dokumen	13
		Melaksanakan tugas atasan	Persen	100
9	Tersusunnya PK dan IKI, laporan e-kinerja, dan penerapan core value ASN BerAKHLAK	Tersusunnya PK dan IKI	Dokumen	2
		Tersusunnya Laporan E-Kinerja Bulanan dan Tahunan (Final)	Dokumen	13
		Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK	Dokumen	12

10	Tersusunnya progres maturitas pelaksanaan sub kegiatan penyusunan produk hukum desa dan fasilitasi pengelolaan aset desa	Progres dari maturitas sub kegiatan penyusunan produk hukum desa dan fasilitasi pengelolaan aset desa	Dokumen	4
11	Penyusunan capaian pelaksanaan sub kegiatan penyusunan produk hukum desa dan pengelolaan aset desa	Progres pelaksanaan sub kegiatan penyusunan produk hukum desa	Persen	100
		Progres pelaksanaan sub kegiatan pengelolaan aset desa	Persen	100
12	Pelayanan konsultasi desa	Tersusunnya dokumen dari pelayanan terhadap desa yang berkonsultasi	Dokumen	12

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

No	Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Rp100.000.000	APBD
2.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Rp250.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa


POINO, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama
Penyusun Bahan Kebijakan
Pengabdian Masyarakat


ALVITA KUMARA WASISTIYANA, S.Tr.I.P.
Penata Muda (III/a)
NIP. 20010720 202409 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **ROYAN HANDANA, S.Sos**
Jabatan : Analis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **JULPIANSYAH, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai Kartanegara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK";
4. Melaksanakan pengelolaan barang dan jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
5. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan;
6. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;
7. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;
9. Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
10. Melaksanakan Manajemen Risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
11. Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
12. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
13. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
14. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
15. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
16. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
17. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
19. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan
Aset Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa


JULPIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19740901 200701 1 015

Pihak Pertama
Analisis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi


ROYAN HANDANA, S.Sos
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19800915 200902 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Menyampaikan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur negara (LHKPN) dan Pajak tahunan (SPT)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahun 2025 pada aplikasi DJP Online	Laporan	1
2.	Menyampaikan dan melaporkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap bulan dan final	Laporan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bulanan dan Final Tahun 2025	Laporan	13
3.	Menyusun Laporan Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Kertas Kerja Manajemen Resiko pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	12
4.	Melaksanakan perintah atasan dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah (Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Melaksanakan perintah atasan diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Kegiatan	12
5.	Melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan penyerapan anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan serta Melaksanakan pelaporan P3DN	Menyusun Kertas Kerja Anggaran Kas Tahun Anggaran 2025	Laporan	2
6.	Melaksanakan Gerakan Etam Mengaji (GEMA) dan pengumpulan Zakat, Infak dan Shodakoh melalui UPZ	Melaksakan Gerakan Etam Mengaji (GEMA) dan pengumpulan Zakat	Kegiatan	12
7.	Menyusun dokumen kebijakan dan input data informasi serta laporan perangkat daerah (Perjanjian Kinerja, SAKIP, Srikandi, E-Pantau, Penilaian Berjenjang, Surat Pertanggung jawaban kegiatan, Billing Pajak, Coretax dan lain-lain)	Input Data Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD pada aplikasi Epantau	Laporan	12
8.	Menyusun dokumen kebijakan dan input data informasi serta laporan perangkat daerah (Perjanjian Kinerja, SAKIP, Srikandi, E-Pantau, Penilaian Berjenjang, Surat Pertanggung jawaban kegiatan, Billing Pajak, Coretax dan lain-lain)	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Surat Menyurat pada aplikasi Srikandi)	Surat	30

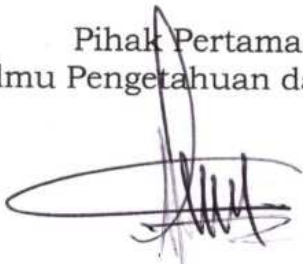
9.	Menyusun dokumen kebijakan dan input data informasi serta laporan perangkat daerah (Perjanjian Kinerja, SAKIP, Srikandi, E-Pantau, Penilaian Berjenjang, Surat Pertanggung jawaban kegiatan, Billing Pajak, Coretax dan lain-lain)	Tersusunnya perjanjian Kinerja Tahun 2025	Laporan	2
10.	Menyusun dokumen kebijakan dan input data informasi serta laporan perangkat daerah (Perjanjian Kinerja, SAKIP, Srikandi, E-Pantau, Penilaian Berjenjang, Surat Pertanggung jawaban kegiatan, Billing Pajak, Coretax dan lain-lain)	Surat Pertanggung jawaban Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	36

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan
Aset Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa


JULPIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19740901 200701 1 015

Pihak Pertama
Analisis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi


ROYAN HANDANA, S.Sos
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19800915 200902 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rinanur Oktavia,SE**

Jabatan : **Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Julpiansyah,S.Sos,M.Si**

Jabatan : **Kepala Sub.Bagian Keuangan dan Aset**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan pengelolaan barang dan jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
4. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan;
5. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;
6. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
7. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;

8. Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
9. Melaksanakan Manajemen Risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
10. Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
11. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
12. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
13. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
14. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
15. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
16. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
17. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.
19. Melaksanakan Gerakan Etam Mengaji (GEMA) dan Pengumpulan Zakat, Infak dan Shodakoh melalui UPZ

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Keuangan dan
Aset,**


Julpiansyah, S.Sos, M.Si
Pembina / IV/a
NIP.19740901 200701 1 015

Pihak Pertama,
**Penyusun Program Anggaran dan
Pelaporan**

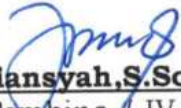

Rinanur Oktavia, SE
Penata Tk I / III/d
NIP. 19840420 201001 2 037

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Penyampaian Laporan Keuangan SKPD	Tersampainya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran / SKPD	Laporan	12
2.	Melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Penyerapan Anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan serta melaksanakan pelaporan P3DN	Terlaksananya Laporan P3DN Kegiatan	Laporan	12
3.	Menyampaikan dan melaporkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap bulan dan final	Terlaporkannya SKP setiap bulan dan final	Laporan	12
4.	Melaksanakan Gerakan Etam Mengaji (GEMA) dan pengumpulan Zakat,Infaq dan shadakah melalui UPZ	Terlaksananya GEMA	Kegiatan	24
5.	Menyusun Laporan Manajemen Resiko Peringkat Daerah	Tersusunnya Laporan Manajemen Resiko Sub Kegiatan	Laporan	3
6.	Menyampaikan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKPN) dan Pajak tahunan (SPT)	Tersampainya Laporan Pajak Tahunan (SPT)	Dokumen	1
7.	Melaksanakan perintah atasan dalam rangka meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah (Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah)	Tercapainya Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan	25

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset,


Julpiansyah, S.Sos, M.Si
 Pembina / IV/a
 NIP.19740901 200701 1 015

Pihak Pertama,
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan


Rinanur Oktavia, SE
 Penata Tk. I / III / d
 NIP.19840420 201001 2 037



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DYAH RISNAWATI, S.E
Jabatan : Pengolah Daftar Gaji

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : JULPIANSYAH, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan Target pada Perjanjian kinerja dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 pada Perangkat Daerah;
2. Menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan melaporkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;
4. Melaksanakan pengelolaan barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan adil tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan tata kelola arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan ketersediaan data dan informasi pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat Inovasi dan atau dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi Perangkat Daerah;
9. Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di Perangkat Daerah;
12. Melaksanakan Review awal terhadap indicator kinerja utama Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini;

13. Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP Tahunan;
15. Tercapainya Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan;
16. Pemenuhan target pendapatan daerah;
17. Melaksanakan monitor Centre for Prevention KPK;
18. Melaksanakan koordinasi konvergensi penurunan stunting di kabupaten;
19. Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah;
20. Melakukan koordinasi, monitoring dan Evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja kepada atasan langsung;
21. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pihak Pertama,
Pengolah Daftar Gaji


JULPIANSYAH, S.Sos., M.Si

Pembina, (IV/a)
NIP. 197409012007011015


DYAH RISNAWATI, S.E

Penata (III/c)
NIP. 197812162012122003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN/URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaporkannya SKP Setiap Bulan Pada Aplikasi E Kinerja	Jumlah Laporan SKP	Laporan	12
2.	Terlaksananya GEMA dan Pengumpulan Zakat, Infak dan Shodaqoh melalui UPZ	Jumlah Kegiatan GEMA, Pengumpulan Zakat, Infak dan Shodaqoh	Kegiatan	24
3.	Terlaporkannya Pajak SPT Tahunan	Jumlah Laporan SPT Tahunan	Laporan	1
4.	Melaksanakan Tugas Kedinasan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	Kegiatan	30
5.	Tersusunnya Laporan Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Laporan	4
6.	Tersusunnya Daftar Gaji, Daftar rapel Gaji dan kelengkapannya	Jumlah Daftar Gaji, Rapel Gaji dan kelengkapannya	Daftar	26
7.	Tersusunnya Daftar Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP)	Jumlah Daftar TPP dan kelengkapannya	Daftar	14
8.	Tersusunnya Data Template Gaji dan tunjangan untuk Aplikasi SIPD RI	Jumlah Template Gaji dan Tunjangan	Data	12
9.	Terinputnya Data Gaji dan Tunjangan di Aplikasi E Pantau	Jumlah Data Gaji dan Tunjangan	Data	24
10.	Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan	Jumlah PK Pelaksana dan SPJ Kegiatan	Dokumen	12
11.	Terinputnya dan Terlaporkannya BUPOT PPh Pasal 21 dan Pelaporan PPh Pasal 21 di Aplikasi Cortax	Jumlah BUPOT dan PPh Pasal 21	Laporan	12
12.	Terlaksananya Rekonsiliasi Gaji dan Tunjangan	Jumlah Rekonsiliasi Gaji dan Tunjangan	Kegiatan	2

NO.	SASARAN/URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
13.	Terinputnya perubahan data Gaji,Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) di Aplikasi SIMGAJI	Jumlah Perubahan data Gaji,Kenaikan Pangkat dan KGB	Data	75
14.	Tersusunnya Data BPJS di Aplikasi ARIP	Jumlah Data BPJS di Aplikasi ARIP	Data	12

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Keuangan dan
Aset


JULPIANSYAH, S.Sos.,M.Si
Pembina, (IV/a)
NIP. 197409012007011015

Pihak Pertama,
Pengolah Daftar Gaji


DYAH RISNAWATI, S.E
Penata (III/c)
NIP. 197812162012122003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI BUDIARTI,SE.
Jabatan : PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
Jabatan : KEPALA SUBBAG UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
2. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
3. Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA SUBBAG UMUM,
KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN


KARTIKA SARL A. Ma. Pd
PENATA TK. I (III/d)
NIP.197205191993062001

PIHAK PERTAMA,
PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN
DAN PELAPORAN DINAS


SRI BUDIARTL. SE
PENATA TK. I (III/d)
NIP. 198205222001122002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Melaksanakan Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
2	Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN/P3K/Non ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas berdasarkan tugas dan fungsi	orang	151
3	Melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselesaikan	Laporan	12
4	Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terlaksana	laporan	12
5	Membuat Kertas Kerja Manajemen Resiko Sub Kegiatan per triwulan	Jumlah Kertas Kerja Manajemen Resiko yang terselesaikan	Kerta Kerja	12
6	Membuat SKP Bulanan dan tahunan	Jumlah SKP	Laporan	13
7	Membuat Perjanjian Kinerja Tahunan	Jumlah Dokumen Kinerja	Dokumen	1

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA SUBBAG UMUM,
KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN


KARTIKA SARI A.Ma.Pd
PENATA TK. I (III/d)
NIP.197205191993062001

PIHAK PERTAMA,
PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN
DAN PELAPORAN DINAS


SRI BUDIARTI L. S.
PENATA TK. I (III/d)
NIP. 198205222001122002

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PERUBAHAN
PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN DINAS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

1. Tugas Utama : Melakukan kegiatan penyusunan dan penelahaan data obyek kerja di bidang program anggaran dan Pelaporan.
2. Fungsi :
 - a. Menerima dan memeriksa bahan dan data perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja ;
 - c. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan perencanaan, penganggaran dan pelaporan ;
 - d. Menyusun konsep perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja ;
 - e. Mendiskusikan konsep perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan rencana program dan anggaran ;
 - g. Mengevaluasi proses penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran;
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan

3. Indikator Kinerja Individu

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	Σ Jumlah Laporan	Kegiatan GEMA
2	Jumlah ASN/P3K/Non ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	Σ Jumlah Orang	RKA/DPA
3	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselesaikan	Laporan	Σ Jumlah Laporan	RKA/DPA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leni Waty, S.Sos

Jabatan : Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris / Pelaksana Sub Bagian Umum
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Kartika Sari, A.Ma.Pd

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik";
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;

8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting;
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

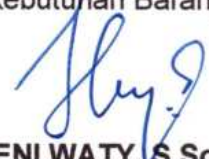
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian


KARTIKA SARI, A. Ma. Pd
Penata Tingkat I
NIP. 19720519 199306 2 001

Pihak Pertama,
Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris


LENI WATY, S.Sos
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19760404 200701 2 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

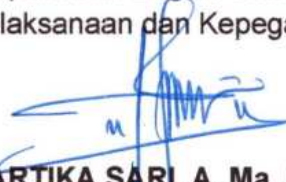
NO	SASARAN/URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersusunnya Daftar RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan APBD dan APBD-P pada Perangkat Daerah	Jumlah Daftar RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan yang tersusun	Daftar	4
2	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Barang yang disediakan	Unit	5
3	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan yang tersusun	Laporan	1
4	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	65
5	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1
6	Tersusunnya Dokumen Administrasi Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah dokumen kelengkapan adm penggunaan anggaran yang tersusun	Dokumen	500
7	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun	Laporan	48
8	Terinputnya data pelaksanaan sub kegiatan pada Aplikasi E-Pantau	Jumlah data pelaksanaan sub kegiatan yang terinput pada aplikasi E-Pantau	Data	48
9	Tersusunnya naskah dinas melalui Aplikasi Srikandi	Jumlah Naskah Dinas yang tersusun melalui Aplikasi Srikandi	Naskah	96

NO	SASARAN/URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Tersusunnya Dokumen Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap bulan dan Tahunan (Final)	Jumlah Dokumen Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap bulan dan Tahunan (Final) yang tersusun	Dokumen	13
11	Tersusunnya Laporan Akhir Pelaksanaan (Laporan Akhir) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan (Laporan Akhir) yang tersusun	Laporan	4
12	Tersusunnya Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu dan Pengukuran APBD dan APBDP Tahun Anggaran 2025	Jumlah Dokumen yang tersusun	Dokumen	6

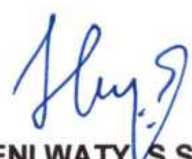
**KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUAPETN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	APBD
2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	APBD
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	APBD
4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	597.256.900	APBD
	Jumlah	747.256.900	

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian


KARTIKA SARI, A. Ma. Pd
Penata Tingkat I
NIP. 19720519 199306 2 001

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025
Pihak Pertama,
Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris


LENI WATY S.Sos
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19760404 200701 2 017



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ike Noralita , S.Pd.,M.Si

Jabatan : Pengelola Data / Pelaksana Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KARTIKA SARI, A.Ma.Pd

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

1. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
2. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
3. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
4. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN
6. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
7. Berkomitmen melaksanakan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.ningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan

mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;

9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.
11. Terkelolanya Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD;
12. Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;

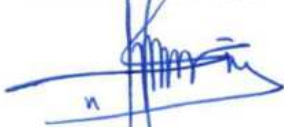
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui tim penyusun, monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum dan
Ketatalaksanaan



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
Penata Tingkat I
NIP. 197205191993062001

Pihak Pertama,
Pengelola Data



IKE NORALITA, S.SPd.,MSi
Penata Tingkat I
NIP. 1983070902 200902 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN/URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak	Jumlah Penyampaian Laporan SKM dan Laporan Rencana Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor,PPID,Pengelolaan platform website DPMD dan	laporan	5
2	Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
3	Melaksanakan an Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen laporan kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Dokumen	4
4	Melaksanakan an Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Dokumen	4
5	Tersusunnya laporan akhir pelaksanaan 2 Sub Kegiatan	Jumlah laporan akhir yang tersusun	laporan	2
6	Tersusunnya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Jumlah dokumen SKP Bulanan dan final (Tahunan) yang tersusun	dokumen	13
7	Menyusun Perjanjian Kinerja, IKI	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	1
8	Tersusunnya dokumen KAK dan RKA sub kegiatan	Jumlah dokumen KAK dan RKA yang tersusun	dokumen	4
9	Terinputnya data pelaksanaan kegiatan pada aplikasi e-pantau	Jumlah data pelaksanaan kegiatan yang terinput pada aplikasi e-pantau	data	24
10	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko Subbagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian per Triwulan, SP4N LAPOR	Jumlah Laporan Manajemen Risiko	Laporan	4

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum dan
Ketatalaksanaan



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
Penata Tingkat I
NIP. 197205191993062001

Pihak Pertama,
Pengelola Data



IKE NORALITA, S.SPd.,MSi
Penata Tingkat I
NIP. 1983070902 200902 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yeni Kaniawati, SE

Jabatan : Pengadministrasi Umum / Pelaksana Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Kartika Sari, A.Ma.Pd

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik";
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;

8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting;
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

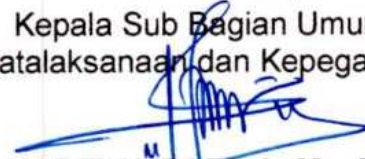
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian


KARTIKA SARI, A. Ma. Pd
Penata Tingkat I
NIP. 19720519 199306 2 001

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Umum


YENI KANIAWATI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19760319 199603 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN/URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	1
2	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	1
3	Tersusunnya dokumen administrasi penyediaan bahan logistik kantor dan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen kelengkapan administrasi realisasi anggaran dan pembukuan yang tersusun	dokumen	400
4	Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun	laporan	24
5	Terinputnya data pelaksanaan sub kegiatan pada aplikasi E-Pantau	Jumlah data pelaksanaan sub kegiatan yang terinput pada aplikasi E-Pantau	Data	24
6	Tersusunnya naskah dinas melalui Aplikasi Srikandi	Jumlah naskah dinas yang tersusun melalui aplikasi srikandi	naskah	48
7	Tersusunnya Dokumen Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Setiap Bulan dan Tahunan (Final)	Jumlah Dokumen Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Setiap Bulan dan Tahunan (Final) yang tersusun	Dokumen	13
8	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan (Laporan Akhir) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan (Laporan Akhir) yang tersusun	Laporan	2
9	Tersusunnya Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu dan Pengukuran APBD dan APBDP Tahun Anggaran 2025	Jumlah Dokumen Yang tersusun	Dokumen	6

**KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUAPETN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN *	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	820.694.300	APBD
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.000.000	APBD
Jumlah Anggaran		844.694.300	

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian


KARTIKA SARI, A. Ma. Pd

Penata Tingkat I
NIP. 19720519 199306 2 001

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Umum


YENI KANIAWATI, SE

Penata Tingkat I
NIP. 19760319 199603 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Bustaniah, S.Sos

Jabatan : Pengadministrasi Umum / Pelaksana Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Kartika Sari, A.MA.Pd

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

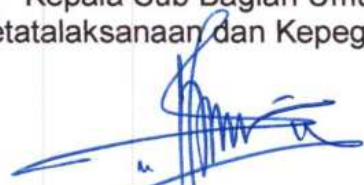
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui tim penyusun, monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
Penata Tingkat I
NIP. 19720519 199306 2 001

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Umum



Hj. BUSTANIAH, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690127 200502 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

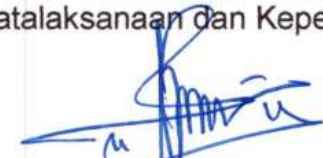
NO	SASARAN/URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	200
2	Tersusunnya laporan akhir sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang tersusun	Laporan	1
3	Terinputnya data pelaksanaan sub kegiatan pada aplikasi E-Pantau	Jumlah data pelaksanaan sub kegiatan yang terinput pada aplikasi E-Pantau	Data	12
4	Tersusunnya Perjanjian Kinerja ASN	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja yang tersusun dan tersampaikan	Dokumen	6
5	Tersusunnya Dokumen Perjanjian Berjenjang	Jumlah Dokumen Penilaian Berjenjang yang tersusun	Dokumen	13
6	Tersusunnya naskah Dinas terkait sub kegiatan	Jumlah naskah Dinas terinput pada aplikasi Srikandi	Naskah	25
7	Tersusunnya laporan Kinerja dan Keuangan sub kegiatan	Jumlah laporan Kinerja dan Keuangan yang tersusun	Laporan	12
8	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Jumlah dokumentasi pelaksanaan Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Dokumentasi	12

**KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN*	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		100.000.000,-	

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
Penata Tingkat I
NIP. 19720519 199306 2 001

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Umum



Hj. BUSTANIAH, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690127 200502 2 002